

Dampak Kerjasama Multilateral International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia Periode 2018-2021

by 07041282025105 Arya Chandra Aljabaru

Submission date: 07-Mar-2024 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2313823825

File name: KSPOR_KARET_ALAM_INDONESIA_PERIODE_2018-2021_-_Arya_Chandra.docx (350.93K)

Word count: 13038

Character count: 84182

**DAMPAK KERJASAMA MULTILATERAL INTERNATIONAL⁴
TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC) TERHADAP
EKSPOR KARET ALAM INDONESIA PERIODE 2018-2021**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional*



Disusun Oleh :
ARYA CHANDRA ALJABARU
07041282025105

**²JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, perdagangan internasional merupakan hal yang penting untuk di perhatikan pada setiap negara. Pesatnya arus perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi membuat setiap negara merubah kebiasaan-nya. Dengan adanya kemajuan di era globalisasi, negara lebih mudah melakukan interaksi dengan negara lain dalam meningkatkan hubungan kerja sama untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang saling menguntungkan. Perdagangan internasional memiliki pengaruh positif untuk meningkatkan sumber devisa negara, transaksi modal, cadangan devisa dan juga membuka peluang kesempatan bekerja.

Bentuk adanya dari perdagangan internasional ialah ekspor-impor, dimana ekspor adalah menjual barang dalam negeri ke luar negeri sedangkan impor membeli barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negeri. Maraknya kegiatan ekspor-impor pada dekade belakangan ini, membuat pemerintah mengambil langkah dalam mengawasi setiap kegiatan perdagangannya. Pasalnya, dari kegiatan perdagangan internasional yang bebas, suatu negara akan mengalami dua kemungkinan atau efek yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tersebut di antaranya keuntungan dan kerugian. Dari dua faktor tersebut jika suatu negara lebih dulu siap untuk menghadapi arus perdagangan bebas, maka negara tersebut akan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya Karena kemudahan yang di dapat dari arus perdagangan bebas tersebut ataupun sebaliknya. Jika suatu negara belum siap dalam menghadapi arus perdagangan yang ada dapat menimbulkan dampak buruk bagi negara tersebut.

Mudahnya arus perdagangan internasional yang bebas masuk ke dalam suatu negara, membuat negara memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan integritasnya. Pasalnya, dari adanya kegiatan perdagangan internasional yang bebas, suatu negara harus mempunyai *basic* kesiapan untuk memanfaatkan arus perdagangan dalam mempermudah negara menjalankan integritas ekonomi untuk masuk ke dalam pasar internasional. Pemerintah harus lebih kreatif dalam menghadapi arus perdagangan bebas. Karena, perdagangan bebas menyebabkan mudahnya barang masuk ke dalam suatu negara. Sehingga pemerintah harus meningkatkan kualitas produk dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional. Hal tersebut di khawatirkan, jika produk dalam negeri tidak dapat memenuhi regulasi internasional atau tidak mampu bersaing dalam pasar internasional maka konsumen beralih pada barang impor dari negara lain di bandingkan membeli produk dalam negeri. Karena banyaknya pilihan barang yang lebih baik dan ekonomis dari produk impor dari negara lain, membuat pelaku usaha dalam negeri mengalami kesulitan untuk mengontrol arus kegiatan tersebut dan harus meningkatkan *value* dari produk yang di jual.

Pemerintah perlu meningkatkan sektor ekonomi guna meningkatkan sumber devisa negara untuk menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan daya saing suatu negara di kancah internasional. Adanya perdagangan bebas merupakan implikasi dari globalisasi yang memberi dampak pada kondisi sosial, ekonomi dan politik suatu negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mengambil Langkah untuk menghadapi perdagangan internasional dengan cara melakukan kerjasama multilateral dalam menghadapi persaingan pasar bebas yang terjadi di era globalisasi ini.

Sektor pertanian mempunyai peran yang penting dalam perdagangan Indonesia, tercatat dari sektor pertanian menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang cukup besar sekitar 13,28% pada tahun 2021 (BPS-Statistics Indonesia 2021).

Karet Alam merupakan sub sektor pertanian yang memiliki potensi terbesar kedua setelah kelapa sawit bagi sumber devisa negara. Tercatat pada tahun 2021 Indonesia berhasil mengekspor karet sejumlah 28,93 juta ton yang bernilai US\$ 29.766.300 (Dr. Anna Astrid S. and Sri Wahyuningsih 2021). Tercatat Indonesia menjadi negara kedua terbesar pengeksport karet yang memiliki angka produksi sekitar 3,12 ton sesudah Thailand yang menjadi negara terbesar pertama pengeksport karet dengan angka Produksi 4,67 Ton pada tahun 2021, di ikuti oleh Vietnam di posisi ketiga dengan total produksi 1,2 ton (Pratama 2023). Perkebunan karet di Indonesia terdiri atas tiga bagian kepemilikan yaitu PB (Perkebunan Besar) yang di pecah menjadi dua bagian Perkebunan Besar Negara (PBN) dengan luas lahan 129,25 Rb hektar dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) sebesar 213,96 dan terakhir PR (Perkebunan Rakyat) yang memiliki luas 433,28 ribu hektar (BPS-Statistics Indonesia 2021)

Dalam menghadapi guncangan ekonomi untuk menstabilisasikan harga karet, pemerintah Indonesia sepakat untuk melakukan kerjasama multilateral dalam satu kawasan bersama tiga negara di Asia Tenggara yang juga sama-sama penghasil karet terbesar di dunia. *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* merupakan organisasi internasional yang di bentuk untuk komoditas karet pada tanggal 12 Desember 2001 berdasarkan *Joint Ministerial Declaration (Bali Declaration 2001)*. Organisasi ini beranggotakan tiga negara produsen karet alam terbesar di dunia yakni Thailand, Indonesia, dan Malaysia (DitjenPPI 2021). Tujuan dari pembentukan ITRC adalah untuk melakukan kerja sama dalam menghadapi masalah yang ada di sektor karet alam seperti kelebihan pasokan dan rendahnya harga jual. Terbentuknya ITRC, menandakan bahwa pemerintah Indonesia siap untuk menghadapi arus perdagangan internasional melalui hubungan kerjasama multilateral untuk berusaha meningkatkan devisa negara dan mensejahterakan petani-petani karet dengan memberlakukan kebijakan penstabilan

harga karet yang adil dalam mematok harga karet yang sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Awal mula terbentuknya *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* di karena kan kegagalan organisasi *International Natural Rubber Organization (INRO)* dalam menstabilisator harga karet alam pada tahun 1979-1999 (Purba 2015). Tujuan dari pembentukan INRO pada masa tersebut, guna untuk menjaga ketersediaan karet alam dunia dengan teknik *buffer stock* (Ulfatmi 2016). INRO memiliki 8 anggota sebagai eksportir karet (Indonesia, India, Pantai Gading, Thailand, Nigeria, Malaysia, dan Sri Lanka) dan negara importir dari INRO (China, Kanada, Australia, Cekoslovakia, EU, Australia, DST). Kegagalan *International Natural Rubber Organization (INRO)* di latar belakang karena kurang efektif dalam menstabilisator harga karet alam pada tahun 1997 dimana tahun tersebut perekonomian dunia sedang mengalami guncangan hebat yang berdampak pada krisis moneter di Indonesia serta di banyak negara. Krisis tersebut sangat berpengaruh pada merosotnya harga karet alam yang membuat organisasi INRO mengalami kesulitan dalam menstabilkan harga karet alam. Sehingga pada tahun 1999 organisasi INRO resmi di bubarkan saat itu (OICN 1996).

Setelah resminya pembubaran INRO, 3 produsen terbesar karet alam di Asia Tenggara Thailand, Indonesia, dan Malaysia (TIM) sepakat untuk melakukan kerja sama bergerak di bidang non-migas dari sub-sektor pertanian yaitu karet alam. Terbentuknya *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* memberikan dampak positif yang cukup baik bagi ekspor karet alam, tercatat setelah pembentukan ITRC harga karet alam di tahun 2002 naik menjadi US\$ 0,68 per kg, dimana tahun sebelumnya pada 2001 harga karet alam hanya sekitar US\$0.45 per kg. Dapat di lihat, gambar grafik di bawah ini pencapaian organisasi internasional ITRC dalam mempengaruhi harga karet alam dunia.

Terbentuknya ITRC memberikan dampak yang positif bagi harga karet alam di tiga negara. Tercatat pada gambar 1.1 di tahun 2001 sampai 2008 pasca terbentuknya ITRC harga karet alam terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Namun di tahun 2009 harga karet alam kembali mengalami penurunan akibat krisis dunia yang awal mulanya terjadi di Amerika Serikat sehingga kekacauan harga terjadi di berbagai komoditas salah satunya karet alam. Sehingga ketiga negara anggota ITRC melakukan pertemuan untuk membahas harga karet alam yang kembali menurun. Hasil dari pertemuan tersebut mengeluarkan dua kebijakan yaitu *Supply Management Scheme (SMS)* dan *Agreed Export Tonnage (AETS)* untuk mengatasi permasalahan pada harga karet alam. Kebijakan tersebut sangatlah signifikan tercatat di tahun selanjutnya 2010 harga karet alam kembali naik dan puncaknya pada tahun 2011 dimana tahun tersebut mendapat perolehan total ekspor tertinggi sekitar 461,32 kg serta harga karet alam mencapai US\$ 4.82 per kg atau kalau Rupiahkan sekitar RP72.936 per kg dan menjadi raihan harga tertinggi pada dekade belakangan ini pada sektor komoditas karet alam (Rauf 2023). Di tahun 2012 hingga 2014 harga karet alam kembali menurun, sehingga ITRC kembali menggunakan kebijakan SMS dan AETS, namun kebijakan tersebut tidak signifikan dalam meningkatkan harga karet alam.

Pada dekade belakangan ini menurut fasilitator perdagangan pusat Kementerian Perdagangan, Annisa Aulani Kusnadi "saat ini tiga negara anggota ITRC Thailand, Indonesia, dan Malaysia (TIM) menguasai sebesar 60% stok karet alam dunia" (Widi 2023). Dan sekitar 78% pengeksport karet alam dunia berasal dari negara anggota ITRC berdasarkan data (Comtrade 2023). Hal ini membuktikan keberpengaruhannya ITRC pada pengendalian permintaan harga karet alam dunia. Terbentuknya ITRC bertujuan untuk memastikan kestabilan harga karet alam dunia yang adil dan pastinya menguntungkan bagi petani karet. Dalam mempermudah mencapai tujuannya, ITRC mendirikan

perusahaan patungan pada 6 Oktober 2003 yang bernama *International Rubber Consortium (IRCo)*. IRCo di dirikan berdasarkan ⁵ *Memorandum of Understanding (MoU)* yang di prakarsai oleh Indonesia, Thailand dan Malaysia melalui kesepakatan penandatanganan *Shareholders Agreement* yang ditandatangani oleh Kementerian Keuangan Thailand, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan Kementerian Keuangan Malaysia (Consortium n.d.). Secara resmi IRCo didirikan pada 24 Agustus 2004 dan berfungsi menjalankan fungsi pemasaran dan menjadi Sekretariat bagi ITRC. Keterlibatan Indonesia di dalam IRCo menjadi langkah yang strategis. Dalam hal ini Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kontribusinya dalam mengembangkan karet alam internasionalnya saja, melainkan juga berpotensi menunjang Pembangunan ekonomi yang inklusif bagi kepentingan nasional.

Instansi penjurur ITRC dipegang oleh Kementerian yang bertanggung jawab terhadap perkembangan industri karet alam di masing-masing negara. Tabel berikut ini akan memberikan gambaran instansi penjurur di tiap negara:

Tabel 1.1 Gambaran Instansi Penjurur di Tiap Negara Anggota IRCo

No.	Negara Anggota	Instansi Penjurur
1.	Thailand	Kementerian Pertanian dan Koperasi (<i>Rubber Authority of Thailand/RAOT</i>)
2.	Indonesia	Kementerian Perdagangan
3.	Malaysia	Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Instumen IRCo: ² *Strategic Market Operation (SMO)* yaitu operasi pasar dengan cara membeli, menjual dan mengatur kelebihan pasokan karet alam dimana hal ini sebagai penunjang dari 3 (tiga) skema ITRC lainnya, yaitu:

³
A. *Supply Management Scheme (SMS)* : Mengatur produksi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan pasokan karet alam.

B. *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* : Mengatur pasokan supply dalam jangka pendek dengan cara membatasi ekspor karet alam.

C. *Demand Promotion Scheme (DPS)* : Meningkatkan konsumsi karet alam baik domestik maupun global.

Pada dasarnya ITRC dan IRCO merupakan dua hal yang berbeda meskipun yang menjalankan kedua aspek tersebut negara yang sama. Karena ITRC mencakup pemerintahan yang membuat pelaksanaan kebijakan dari kegiatan perdagangan karet alam, sedangkan IRCo merupakan Perusahaan swasta yang hanya mencakup jual-beli yang bersifat bisnis untuk membantu kestabilan harga karet alam yang di jalani oleh ITRC.

⁵
Tabel 1.2

Tujuan Ekspor Karet Alam Indonesia

NO.	Negara Tujuan	2020		2021	
		³ Volume (TON)	Nilai (000 US \$)	Volume (TON)	Nilai (000 US \$)
1.	Amerika Serikat	449.683	606.641	547.713	942.818
2.	Jepang	388.311	526.070	487.851	842.950
3.	China	329.985	406.924	174.722	301.588
4.	India	188.618	246.890	174.352	299.215
5.	Korea Selatan	149.638	189.475	141.915	239.184
Jumlah/Total		1506235,00	US1.976.000,00	1526553,00	US2.625.755,00

Sumber: BPS (diolah penulis)

Dari table 1.2 berdasarkan perkembangan dua tahun terakhir 2020-2021 tujuan ekspor karet alam Indonesia, menunjukkan bahwa Amerika Serikat menjadi tujuan impor

karet alam Indonesia terbesar di tahun 2020 dan 2021 dengan berhasil mengimpor karet alam Indonesia, dengan berat 449.683 ton pada 2020 dan di tahun 2021 impornya naik menjadi 547,713 ton. Di urutan kedua ada negara Jepang yang mengimpor 388.311 Ton di tahun 2020 dan 487.851 Ton pada 2021. Di urutan nomor tiga ada negara China dengan mengimpor 329.985 Ton pada 2020 dan di tahun 2021 menyusut angka impornya menjadi 174.722 Ton. Di urutan nomer empat ada India yang berhasil mengimpor 188.618 Ton di tahun 2020 dan pada tahun selanjutnya 2021 mengimpor 174.352 Ton. Dan di urutan ke lima ada Korea Selatan yang di tahun 2021 mengimpor 149.638 Ton dan di tahun 2021 mengimport 141.915 Ton.

Dari kelima ⁵ negara tujuan ekspor karet alam terbesar Indonesia di tahun 2020-2021, tujuan ekspor karet alam kelima negara tersebut mengalami tren naik-turun atau fluktuasi. Permasalahan pada penurunan angka ekspor komoditas karet pada 2019-2020 tidak terlepas dari adanya permasalahan wabah penyakit gugur daun karet (GDK) dan guncangan perekonomian dunia. Ditahun 2019 perkebunan karet mengalami permasalahan akibat wabah penyakit gugur daun akibat jamur *Pestalotiopsis* sp. Penyakit tersebut awal mulanya di temukan di Peninsula Malaysia lalu berkembang ke wilayah sentra perkebunan karet di Indonesia. Adanya wabah penyakit gugur karet tersebut memberikan efek pada penurunan volume ekspor karet alam Indonesia pada tahun 2019.

Permasalahan pada komoditas karet terus berlanjut, di tahun yang sama pada 2019 dunia mengalami masalah besar karena terjadi pandemi Covid-19 yang di puncaki pada tahun 2020. Hal ini membuat negara menutup diri dari seluruh aktivitas kegiatan internasionalnya, karena di khawatirkan virus Covid-19 dapat menyebar dengan cepat. Semua negara pada saat itu memberlakukan kebijakan *lockdown* yang berarti pemberhentian semua aktivitas di wilayah tersebut untuk menghentikan penyebaran rantai virus. Pandemi Covid-19 membuat dampak buruk bagi perekonomian global

tercatat dari *International Monetary Fund (IMF)* mengalami kerugian sekitar US\$ 12 Triliun yang menyebabkan negara-negara di dunia mengalami kontraksi bagi pertumbuhan ekonominya. Prospek ekonomi di suatu negara pada saat pandemi tidak dapat di prediksi akibat pelambatan ekonomi global. Hal tersebut juga memberikan dampak dari negara besar pengimpor komoditas karet seperti Amerika Serikat, RRC, India, Korea, DLL yang memberhentikan aktivitas perdagangannya karena pemberlakuan *lockdown* hal tersebut menyebabkan kegiatan produksi dengan penggunaan bahan baku karet alam di negara tersebut juga ikut berhenti untuk sementara. Aspek tersebut memberikan efek kepada penurunan permintaan produsen karet dan juga membuat harga karet mengalami kemerosotan. Pada tahun 2021, negara-negara mulai memberhentikan *lockdown* dan memulai kembali aktivitas perdagangan yang sebelumnya telah rehat akibat pandemi Covid-19. Setiap negara berupaya penuh untuk memulihkan perekonomian negaranya pasca Covid-19, untuk kembali memulihkan dari kerugian yang dialami selama masa *lockdown* karena pemberhentian aktivitas perdagangan. Tercatat pada 2021, aktivitas perekonomian dunia kembali berjalan.

Perdagangan internasional memberikan efek yang baik untuk sumber defisit negara. Karet alam telah menjadi salah satu komoditas ekspor utama yang mempunyai nilai tambah bagi perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang strategi pemasaran karet alam untuk mendapatkan nilai tambah bagi komoditas karet pada ranah internasional. ITRC yang beranggotakan Thailand, Indonesia dan Malaysia bertujuan untuk menstabilkan harga karet alam dan meningkatkan ekspor pada anggotanya. Berdasarkan fakta dari adanya kerjasama multilateral⁴ *International Tripartite Rubber Council*, kegiatan ekspor karet alam di Indonesia mengalami tren yang cukup baik berfluktuatif meskipun komoditas karet mengalami permasalahan mengenai gugur daun karet dan guncangan perekonomian

global akibat pandemic Covid-19. Data yang di gunakan dalam penelitian ini mencakup periode paling baru 2018-2021 dan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dalam industri karet alam Indonesia. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengangkat topik penelitian ini dengan judul “DAMPAK KERJASAMA MULTILATERAL INTERNATIONAL TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC) TERHADAP EKSPOR KARET ALAM INDONESIA PERIODE 2018-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, penelitian ini akan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

” Bagaimana Dampak Kerjasama Multilateral ⁴ International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Ekspor Karet Alam Di ⁴ Indonesia Periode 2018 - 2021? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kerjasama multilateral ITRC dalam berkontribusi menstabilikan ekspor karet alam Indonesia periode 2018-2021 melalui instrumen yang telah di buat ITRC.

² 1.4 Manfaat Penelitian

Penulis ² berharap dari hasil ² penelitian ini memberi banyak manfaat ² untuk pembaca yang sedang *research* mengenai kerjasama multilateral ITRC, ² sehingga penelitian ini memiliki fungsi yang maksimal, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. ² Penelitian ini di harapkan ² memperkaya wawasan bagi ² peneliti dan pembaca.

- b. Dapat memberikan atau menambah perbendaharaan Pustaka.
- c. Pada penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan dalam penelitian lebih lanjut dan juga memberi sumbangan penelitian bagi studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai “Dampak Kerjasama Multilateral ⁴ International Tripartite Rubber Council (ITRC) terhadap ekspor karet alam Indonesia periode 2018-2021”.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Untuk peneliti, di harapkan peneliti lebih meningkatkan analisa berpikir yang kritis dengan mencoba mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sehingga memberi motivasi untuk lebih semangat lagi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Untuk pembaca, di harapkan penelitian ini mampu menjadi sumber informasi yang dapat di gunakan oleh akademisi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih sempurna terkhusus dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai sumber acuan penulis serta menjadi inspirasi terhadap penulisan yang akan dilakukan peneliti. Dengan adanya hasil penelitian terdahulu, penulis akan lebih mudah dalam melakukan penelitian karena penelitian terdahulu akan di jadikan pedoman untuk menemukan gap dan penelitian yang terbaru akan mengisi kekosongan dalam melakukan pengembangan pada penelitian terdahulu.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penelitian	Birka Septy Meliani, Yusman Syaukat dan Hastuti
	Judul	Struktur Pasar dan Daya Saing Karet Alam Indonesia di Amerika Serikat
	Sumber	Jurnal, Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
	Tahun	2021

	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang bertujuan menganalisis struktur pasar karet alam Indonesia di Amerika Serikat. Analisis ini dilakukan pada periode 2008-2019. Hasil analisis dari penelitian ini adalah pasar dari karet alam Indonesia di Amerika Serikat memiliki kecenderungan oligopoly di banding negara eksportir karet lainnya. Karet alam Indonesia mempunyai keunggulan yang rendah di bandingkan pesaing utamanya berdasarkan sejumlah faktor dari analisis Diamond's Porter. Tapi tidak menutup kemungkinan karet alam Indonesia di masa akan mendatang akan menjadi potensial di Amerika Serikat. (Birka Septy Meliani 2021)
	Perbandingan	Pada penelitian terdahulu hanya berfokus pada analisis struktur pasar dan daya saing pada ekspor karet alam Indonesia ke Amerika Serikat. Sedangkan penelitian ini berfokus secara general terhadap kebijakan-kebijakan yang di jalankan International Tripartite Rubber Council dan menganalisis peran yang telah dijalankan ITRC terhadap ekspor karet alam Indonesia di tahun 2018-2021.
2	Nama Penelitian	Lena Anita Sulastri Purba
	Judul	Dampak Ekonomi Politik Dari ITRC – INRA Terhadap Produktivitas Karet Alam Indonesia Tahun 2009-2013
	Sumber	Jurnal, Universitas Riau, FISIP Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Volume 2
	Tahun	2015
	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang bertujuan mengeksplorasi peran ITRC sebagai stabilisasi harga karet alam dunia. Penelitian ini memiliki permasalahan produktivitas karet alam

		Indonesia yang mengalami penurunan akibat dampak krisis ekonomi global pada 2008. Kerja sama tiga negara produsen karet <i>International Tripartite Rubber Council</i> berhasil memberikan dampak positif bagi harga karet alam dan peningkatan produksi dari total ekspor karet alam Indonesia dan negara anggota lainnya melalui skema kebijakannya di tahun 2009-2013.
	Perbandingan	Penelitian terdahulu berfokus dalam menjelaskan kerja sama ITRC dan INRO dalam keberhasilannya dalam meningkatkan produktivitas karet alam melalui skema kebijakan di tahun 2009-2013. Penelitian ini memiliki persamaan, yang sama-sama meneliti kerja sama ITRC dalam meningkatkan harga karet alam dunia namun memiliki perbedaan di tahun penelitian dan konsep penelitian. Penelitian terdahulu ini dapat menjadikan tinjauan pustaka sebagai gambaran mengenai kerja sama ITRC.
3	Nama Penelitian	Trisna Ulfatmi
	Judul	Analisis Dampak Kebijakan <i>International Tripartite Rubber Council</i> (ITRC) Dalam Mempengaruhi Harga Melalui Pengaturan Produksi dan Ekspor Karet Alam di Tiga Negara
	Sumber	Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Perencanaan dan Kebijakan Publik
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang bertujuan menganalisis kebijakan <i>International Tripartite Rubber Council</i> (ITRC) dalam melakukan peningkatan ekspor pada 3 negara melalui pengaturan produksi. Penelitian ini menyajikan data dari tahun 2000-2014 sebagai tolak ukur harga pada ekspor karet

		<p>alam pertahunnya. Dengan adanya tolak ukur tersebut, peneliti menganalisis harga nilai jual dan ekspor karet alam, mengalami kenaikan dan penurunan di waktu-waktu tertentu.</p> <p>Dari data yang di sajikan peneliti, permasalahan yang sering terjadi pada komoditas karet alam ialah produksi pada tiga negara produsen mengalami peningkatan pada hasil produksi, sedangkan permintaan dari negara konsumen mengalami penurunan akibat krisis hal tersebut terjadinya over supply. Adanya permasalahan tersebut maka ITRC mengambil langkah dengan melakukan kebijakan AETS dalam mengatur pasokan karet alam dalam meningkatkan harga karet alam. Penelitian tersebut juga menganalisis skema SMS dan mengatakan bahwa skema tersebut belum efektif karena tidak tersedianya format pelaporan pada tahun tersebut.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian terdahulu berfokus dalam melakukan analisis pada kegiatan ekspor karet alam sejak sebelum adanya ITRC pada tahun 2000 sampai dengan terbentuknya kesepakatan ITRC hingga tahun 2014 melalui penelitian kuantitatif. Penelitian ini memiliki sedikit persamaan yang sama-sama meneliti ITRC. Namun berbeda dengan kajian peneliti penulis yang menggunakan data kualitatif dan menggunakan data terbaru pada tahun 2018-2021. Namun penelitian ini akan menjadi tinjauan Pustaka karena memiliki topik yang hampir sama mengenai kerja sama ITRC.</p>
4	Nama Penelitian	Alfi Nurdina
	Judul	Pengaruh Ekspor Non- <i>International Tripartite Rubber Council</i> Terhadap Pembentukan Harga Karet Alam Indonesia

	Jurusan	Tesis, Institut Pertanian Bogor Fakultas Ekonomi dan Manajemen Jurusan Sains Agribisnis
	Tahun	2022
	Hasil Penelitian	<p>Dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang bertujuan dalam menganalisis pengaruh ekspor karet alam negara non-ITRC terhadap harga karet alam petani Indonesia.</p> <p>Penelitian ini tidak menemukan keberpengaruhan negara non-ITRC terhadap pembentukan harga karet alam dunia, maupun domestik. Keberpengaruhan harga karet alam di pengaruhi oleh banyak faktor non fundamental menurut penelitian ini.</p>
	Perbandingan	<p>Penelitian terdahulu berfokus dalam melakukan analisis pengaruh nilai ekspor karet alam dari negara Non-International Tripartite Rubber Council. Penelitian ini memiliki persamaan yang membahas tentang ekspor komoditas karet alam dengan sudut pandang yang berbeda, melalui analisis negara non-ITRC dalam melihat keberpengaruhan negara tersebut dalam mempengaruhi nilai ekspor karet alam. Sedangkan penulis membahas Namun penelitian ini akan menjadi tinjauan Pustaka karena memiliki topik yang hampir sama mengenai kerja sama ITRC. “Peran Kerjasama Multilateral <i>International Tripartite Rubber Council</i> (ITRC) Terhadap Nilai Ekspor Karet Alam Indonesia Periode 2018-2021”. Namun penelitian ini akan menjadi tinjauan Pustaka karena memiliki topik yang hampir sama mengenai ekspor pada karet alam dunia.</p>
5	Nama Penelitian	Silvy Oktavian
	Judul	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Kelapa Indonesia Periode 1986-2018 Pendekatan Error Correction Model (ECM)

	Sumber	Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi
	Tahun	2020
	Hasil Penelitian	Dari hasil penelitian ini menghasilkan sebuah kajian yang bertujuan menganalisis pengaruh produksi dunia pada komoditas kelapa internasional. Berdasarkan analisis, produksi dunia pada komoditas kelapa sedang mengalami permintaan tinggi yang berdampak positif pada ekspor kelapa di Indonesia karena peningkatan volume eskpornya. Harga kelapa dunia mengalami perubahan perilaku karenakelapa dunia mengalami perubahan perilaku di karenakan pada <i>supply-demand</i> kelapa dunia sudah terkontrol dengan adanya organisasi International Coconut Organization (ICC) yang beranggotakan eksportir kelapa dunia salah satunya Indonesia.
	Perbandingan	Penelitian terdahulu ini berfokus pada ekspor kelapa yang sedang mengalami tren kenaikan dan berfokus pada peran yang dijalankan ICC dalam menjaga <i>supply-demand</i> kelapa dunia. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan, dimana penelitian ini membahas tentang ekspor kelapa dunia sedangkan penelitian pada penulis membahas tentang komoditas karet dan berfokus pada organisasi ITRC. Tetapi penelitian memiliki fokus yang sama dalam menganalisis <i>supply-demand</i> pada suatu komoditas.

2.2 Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah peneliliti dalam memahami permasalahan yang ada dan menjawab rumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, dalam hal ini peneliliti menggunakan sebuah teori kerjasama multilateral menurut Keohanne

2.2.1 Teori Kerjasama Multilateral

Di era globalisasi ini, setiap negara berupaya meningkatkan hubungan kerja sama antar negara dalam mengisi kekosongan di negara-nya. Pada dasarnya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan negara lain dalam memenuhi kebutuhan dalam negerinya terlebih meningkatnya kemajuan teknologi dan perkembangan. Hal tersebut, membuat negara berupaya melakukan kerja sama dengan negara lain karena ketergantungan dan kebutuhannya di masing-masing negara. Perlu adanya kerja sama untuk mencapai kepentingan bersamanya pada suatu negara. Perkembangan pada hubungan internasional dapat dilihat dengan berbagai kerja sama internasional dan meningkatnya beberapa aspek seperti rasionalisme ekonomi di setiap kawasan yang telah membawa pengaruh dampak pada persoalan ekonomi yang lebih menyita perhatian dari aktor negara melalui kerja sama internasional (Zulkifli 2012)

Awal lahirnya studi Hubungan Internasional, kerja sama internasional telah menjadi perhatian yang di peruntukkan dalam mewujudkan perdamaian dunia (*to build world peace*) atau mencegah terjadinya konflik yang lebih besar (*to prevent war*). Orientasi kerja sama internasional pada masa sekarang ini sudah bergeser menjadi kebutuhan bagi setiap negara di dunia. Banyaknya dan segala macam bentuk interaksi yang dilakukan antar negara membuat konsep kerja sama menjadi konsep berpikir dasar dalam ilmu hubungan internasional. Definisi kerja sama menurut sarjana HI, Robert Keohane mengatakan kerja sama terjadi ketika perilaku aktor dan non aktor menyesuaikan selera dengan pihak lain melalui proses kebijakan. Bagi Keohane, kerja sama tidak dapat dilihat dari fungsi dan keberadaan kepentingan

bersama melainkan sebagai tujuan yang dapat di capai oleh suatu negara (L. 1996).

Terdapat dua komponen penting dalam melakukan kerja sama.

1. Sikap dari aktor negara, mendorong kepada kepentingan bersama atau tujuan bersama.
2. Adanya kerja sama akan mendapatkan keuntungan atau imbalan yang memberi keuntungan.

Dalam tujuan utamanya, ² suatu negara melakukan kerja sama internasional untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak bisa di lakukan dalam negerinya. Syarat yang harus di penuhi dalam kerja sama internasional sekurang-kurangnya harus di miliki dua syarat utama, pertama, suatu negara harus menghargai kepentingan nasional negara anggota lainnya. Jika suatu negara tidak dapat menghargai kepentingan nasional negara lainnya, jangan harap ada pencapaian dari sebuah kerja sama yang di harapkan semula. Kedua, melakukan kesepakatan bersama dalam mengatasi setiap permasalahan yang ada. Untuk mencapai sebuah kesepakatan, setiap negara perlu melakukan komunikasi dan konsultasi secara berkelanjutan sampai masalah tersebut teratasi. (Sjamsumar Dam & Riswandi 1995) dalam ilmu hubungan internasional, kerja sama terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kerjasama bilateral, regional dan multilateral. Kerjasama bilateral adalah Kerjasama yang dilakukan pada dua negara, sedangkan kerjasama regional merupakan kerja sama yang dilakukan pada satu kawasan dan kerjasama multilateral adalah kerja sama yang terjalin oleh berbagai negara dan tanpa adanya Batasan kawasan mana pun.

Kerjasama multilateral merupakan suatu hubungan kerjasama yang di lakukan lebih dari dua negara tanpa adanya batasan dari suatu kawasan tertentu atau dapat

mencakup banyak negara di beda kawasan. Keohanne mendefinisikan kerjasama multilateral adalah praktik koordinasi kebijakan nasional dalam tiga negara atau lebih (Keohane 1990). Ruggie pun sepakat dengan cara pandang Keohanne terhadap kerjasama multilateral yang mendefinisikannya melalui identifikasi beberapa elemen penting: tiga negara ataupun lebih dalam melakukan kerja sama berdasarkan kode etik yang “tak terpisahkan” dan menjamin adanya timbal balik atau saling menguntungkan secara merata (Ruggie 1992). Kerjasama multilateral sangat penting di lakukan untuk suatu negara dalam menghadapi tantangannya, karena tidak ada satu negara, lembaga maupun kelompok yang dapat menyelesaikan permasalahannya melainkan secara bersama-sama. Resep keberhasilan kerjasama salah satunya melakukan pembelajaran dari masa lalu yang sebelumnya sudah mengalami suatu isu yang sama dan mempelajari pengalaman dari pihak lain agar mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Dilakukannya kerjasama multilateral adalah untuk mengatur perihal yang menyangkut pada kepentingan umum dan juga bersifat terbuka, hal tersebut membuat kerjasama multilateral sering di katakan sebagai *law making treaties*. Adanya kerjasama dapat membantu dalam menangani berbagai aspek kepentingan suatu negara yang tidak dapat di selesaikan secara sendiri untuk memberikan hasil yang lebih baik. Manfaat yang di dapat dari kerjasama multilateral yang saling melengkapi ialah dari adanya hasil kesepakatan tidak hanya mengatur negara yang dalam ke ikut sertaannya saja melainkan negara yang tidak ikut andil mendapat dampak-nya dan minim nya persaingan serta berkurangnya duplikasi kerjasama antar mitra. Gagasan bahwa multilateralisme merupakan kerja sama antara lebih dari tiga negara tampaknya diperlukan. Memikirkan adanya legitimasi menurut Keohanne adalah, dengan cara melihat dampak dari kerja sama di bagi menjadi dua macam yaitu *output* dan *input*. *Input* yang di maksud menurut keohanne dalam

kerjasama multilateral di bagi menjadi dua variable yaitu prosedur dan akuntabilitas sedangkan outputnya adalah efektivitas (Kennedy 2001).

Penelitian ini akan memakai konsep kerjasama multilateral menurut Robert O, Keohanne dari penelitian John, F Kennedy yang berjudul *Between Centralization and Fragmentation: The Club Model of Multilateral Cooperation and Problems of Democratic Legitimacy*, dimana dalam peneltiannya menjelaskan bahwa suatu dampak baik buruknya dari hubungan kerjasama multilateral dapat di lihat melalui input dan output. Pada penelitian ini indikator untuk mengidentifikasi bahwa pemerintah sebagai *input* yang memiliki peran dalam pembuatan kesepakatan dimana hasil yang di dapat dari kesepakatan tersebut berupa *output* manfaat hasil kerjasama multilateral tersebut. Kedua komponen *Input-Output* menurut Keohanne terbagi ke beberapa komponen kecil sebagai berikut:

A. Input

Input dari kerjasama multilateral menurut Keohanne terbagi menjadi dua bentuk yaitu prosedur dan akuntabilitas untuk menjelaskan bagaimana kegiatan kerjasama multilateral itu terjadi.

1. Prosedur

Kerjasama multilateral pada komponen prosedur di artikan sebagai langkah-langkah dari tahapan kegiatan dalam melaksanakan suatu aktivitas pekerjaan untuk memecahkan suatu masalah dengan mengeluarkan suatu kebijakan melalui kerjasama multilateral.

2. Akuntabilitas

Kerjasama multilateral dalam komponen akuntabilitas di artikan sebagai tanggung jawab seseorang atau organisasi dalam

melaksanakan pekerjaannya. Adapun akuntabilitas menurut Keohanne ialah memperkuat kontrol negara melalui rantai delegasi, adanya transparansi yang memadai, memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam negeri dan meningkatkan kontrol legislatif atas kebijakan di tingkat supranasional.

B. Output

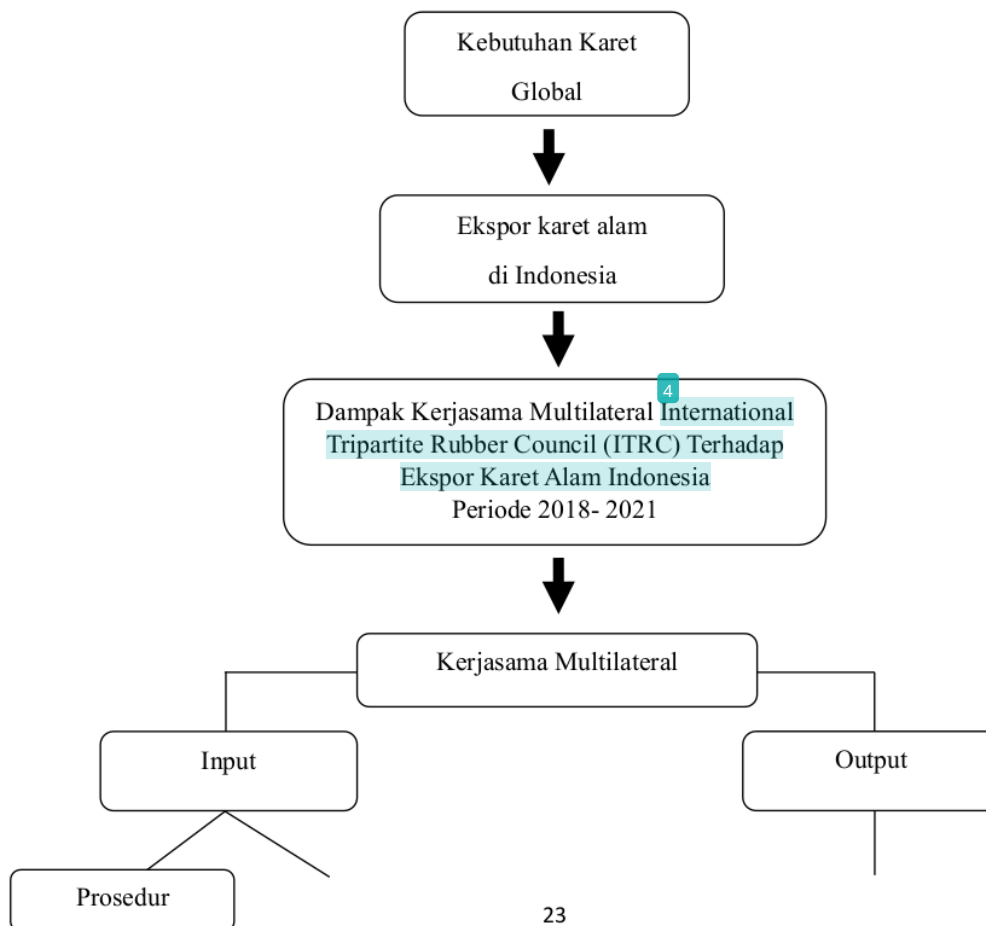
Output merupakan hasil dari dampak aktivitas yang dilakukan pada input berupa manfaat politik, ekonomi, serta nation branding.

1. Efektifitas

Kerjasama multilateral dari komponen efektifitas dapat di definisikan sebagai suatu pencapaian atau sasaran dari tujuan yang sudah di rencanakan pada suatu kegiatan. Adapun efektifitas akan di lihat dari legitimasi baik secara makro maupun mikro, pada sisi makro, melihat keseluruhan pencapaian suatu organisasi.

Untuk membantu penulis dalam menjawab rumusan masalah peneliti menggunakan teori kerjasama multilateral. Menurut Keohanne teori kerjasama multilateral terdapat dua poin konsepsi melalui hasil *input* dan *output* dari kerjasama tersebut. Teori ini akan melihat bagaimana dampak dari adanya kerjasama multilateral *International Tripartite Rubber Council* dalam menangani suatu masalah ketika ekspor karet alam mengalami gangguan melalui skema kebijakan yang telah di sepakati ketiga negara anggota Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM).

2.3 Kerangka Pemikiran



Akuntabilitas

Efektivitas

Sumber: Diolah Penulis

2.4 Argumentasi Utama

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, melihat adanya dampak dari kerjasama multilateral terhadap ekspor karet alam di Indonesia pada 2018-2021 melalui International Tripartite Rubber Council dapat di lihat dari prosedur skema kebijakan di hasilkan cukup baik terorganisir serta efektif dalam memberikan dampak ekspor karet alam Indonesia dengan adanya kerjasama multilateral tiga negara penghasil karet alam Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM). Maka hipotesis penulis adalah ITRC telah berhasil menunjukan eksistensi kerjasama multilateralnya serta berhasil dalam mengupayakan kestabilan ekspor karet alam Indonesia.

² BAB IV

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum pada objek penelitian merupakan bentuk Upaya dalam memberikan gambaran situasi dan kondisi mengenai tempat peneliti dalam mendapatkan data-data yang valid untuk mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik yang relevan. Adapun objek penelitian pada penelitian ini berupa dapat berupa instansi pemerintahan ataupun non pemerintahan, *National Government Organization (NGO)*, *International Non-Government Organization (INGO)*, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain sebagainya.

Objek pada penelitian ini bertempat di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia. Adapun isi dari bab 4 gambaran umum penelitian ini akan menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan tugas Kementerian Perdagangan RI, peran Kementerian Perdagangan, struktur organisasi serta

peran Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Indonesia, ⁴ International Tripartite Rubber Council dan ekspor karet alam Indonesia.

4.2 Peran Kementerian Perdagangan RI

Dalam menjalankan urusan di bidang perdagangan, Presiden di bantu oleh Kementerian Perdagangan dalam menyelenggarakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Perdagangan memiliki peran sebagai berikut:

1. Peran pertama dari adanya kementerian perdagangan ialah perumusan dan penetapan peraturan di bidang penguatan dan pengembangan dalam negeri, standarisasi perdagangan pengendalian mutu barang, tertib ukur, pemberdayaan konsumen dan pengawasan barang atau jasa yang beredar pada pasar, pengawasan dari kegiatan perdagangan, pengendalian, pengelolaan barang, peningkatan dan memfasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, meningkatkan fasilitas impor serta mengamankan perdagangan, meningkatkan akses pasar barang dan jasa pada forum internasional, mempromosikan barang, mengembangkan dan meningkatkan produk, ¹ pembinaan dan pengawasan pada bidang perdagangan berjangka komoditi, pasar ekspor dan pelaku ekspor dan ¹ pasar lelang komoditas
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor

- serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas
 4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan
 5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
 6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
 7. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan
 8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perdagangan.

4.4 International Tripartite Rubber Council

International Tripartite Rubber Council di bentuk pada 12 Desember 2001 berdasarkan Joint Declaration. Organisasi ini beranggotakan tiga negara produksi karet alam terbesar di dunia yaitu Thailand, Indonesia dan Malaysia. Tujuan terbentuknya organisasi ini adalah untuk mengatasi permasalahan pada sektor karet mengenai harga jual, menjaga

keseimbangan pada supply-demand dan menjaga stabilisasi ekspor pada negara anggotanya. Terbentuknya ITRC di latarbelakangi oleh kemerosotannya organisasi karet alam *International Natural Rubber Organization (INRO)* dalam menjaga *supply* pada karet alam dengan menggunakan *buffer stock*. Sejak di bubarkanya ITRO pada 1999, tidak ada lagi organisasi yang berfungsi untuk stabilitator karet alam. Sehingga tiga negara produsen sepakat mengadakan perundingan untuk membahas karet alam.

Dalam upayanya mengatasi kemerosotan nilai karet alam setelah adanya *over supply* karet alam dunia. Tiga Menteri negara produsen karet alam dunia, Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Perusahaan Utama Malaysia dan Menteri Utama Pertanian dan Koperasi Thailand sepakat menandatangani *Join Ministerial Declaration* pada 12 Desember 2001 di Bali dengan di bentuknya *International Tripartite Rubber Council*.

Dalam melengkapi langkah-langkah yang akan di ambil International Tripartite Rubber Council. Ketiga negara juga bersepakat membentuk Perusahaan patungan *Internasional Rubber Consortium Limited (IRCo)*. Terbentuknya IRCo tertuang berdasarkan *Memorandum of Understanding (MoU)* yang telah di tanda tangani tiga Menteri di antaranya, Menteri Perdagangan Indonesia, Menteri Perusahaan Utama Malaysia dan Menteri Utama Pertanian dan Koperasi Thailand pada tanggal 8 Agustus 2002 di Bali.

Dalam menjalankan perannya sebagai dewan tripartite karet, ITRC memiliki skema kebijakan di antaranya:

- 3 A. *Supply Management Scheme (SMS)* : Mengatur produksi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan pasokan karet alam dalam jangka Panjang.
- B. *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* : Mengatur pasokan supply dalam jangka pendek dengan cara membatasi ekspor karet alam.

C. *Demand Promotion Scheme (DPS)*: Meningkatkan konsumsi karet alam baik domestik maupun global.

Adapun Struktur dari ITRC:

1. *Ministerial Committee (MC)*: Merupakan badan tertinggi dari ITRC, yang beranggotakan para menteri.
2. ITRC: Merupakan dewan yang berada dibawah kedudukannya dari MC dan bertugas melapor kepada MC untuk memperoleh arahan MC.
3. *National Tripartite Rubber Corporation (NTRC)*: Merupakan focal point dari negara anggota untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada ITRC
4. Komite dibawah naungan ITRC: *Statistik, Expert Group on Establishment of Regional Rubber Market, Committee on Cost of Production, Demand Promotion Scheme Committee and AETS Monitoring and Surveillance Committee*

Terbentuknya hubungan multilateral International Tripartite Rubber Council (ITRC) ketiga negara yang di wakili masing-masing negara anggotanya sebagai focal point di antaranya:

- Thailand: Kementerian Pertanian dan Koperasi
- Indonesia: Kementerian Perdagangan (Ditjen PPI)
- Malaysia: Kementerian Perusahaan Perladangan dan Industri

Dengan di jadikan Kementerian Perdagangan sebagai focal point dari perwakilan Indonesia pada *International Tripartite Rubber Council*, menandakan pentingnya Kementerian Perdagangan (Indonesia), sebagai penunjang komoditas karet alam dalam memainkan peran pada pasar global dan juga melakukan upaya diplomasinya bersama

Thailand dan Malaysia yang juga sebagai anggota dari ITRC dalam meningkatkan nilai karet alam global dan meningkatkan ekspor pada masing-masing negara anggota ITRC.

4.5 Sejarah Produksi Karet Alam Indonesia

Karet alam pertama kali muncul di temukan oleh penjelajah Christopher Columbus sekitar tahun 1495-96. Dimana dia melihat bangsa Indian Amerika bermain bola pantul yang terbuat dari bahan karet alam. Namun, sampel dari karet alam tersebut baru di kirim ke eropa setelah 240 tahun setelah awal di temukannya oleh Columbus. Karet alam tersebut selanjutnya di teliti oleh ilmuwan Perancis Charles de la Condamine yang kala itu mengunjungi Ekuador. Ilmuwan tersebut lalu memberi karet dengan istilah nama Perancis 'caoutchouc' (Study n.d.).

Awal mula upaya budidaya karet alam dilakukan pada tahun 1876 oleh bangsawan Inggris Henry Wickam, yang mengumpulkan benih dari pohon brasil dengan nama lain dari karet alam (botani *Hevea brasiliensis*) dan akan mengirimkan benih tersebut ke New Botanic Gardens di London. Bibit dan benih tersebut lalu berkecambah di Sri Lanka namun hasilnya mengecewakan. Di tahun berikutnya bibit karet di kirimkan ke Singapura yang bertujuan untuk menjadi basis industri karet alam di Asia Tenggara.

Karet alam memiliki banyak spesies *Havea* di antaranya; *Havea Brasiliensis*, *Havea Benthamiana*, *Havea Guenensis Collina*, *Havea Pausiflora*, *Havea Rigidifolia*, *Havea Nitida*, *Havea Confusa* dan *Havea Microphylla*. Namun dari banyaknya spesies *Havea*, hanya *Havea Brasiliensis* saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena banyak menghasilkan lateks.

(Sofiani Dkk 2018). Tanaman karet dapat tumbuh dengan baik di area tropis lembab dengan curah hujan tahunan yang merata sekitar 1.500 sampai 2000mm, suhu udara yang baik sekitar 24-28C dan dengan penyinaran matahari yang cukup sekitar 5-7 jam perhari jika syarat tersebut tidak di miliki di suatu kawasan maka pertumbuhan pada Perkebunan karet akan lebih lambat. Tanaman karet banyak di tanam di ketinggian 0-500 mdpl dengan tinggi optimus 0-200 m. Pada syarat zona tersebut di miliki pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara salah satunya di Indonesia. Sehingga negara-negara di Asia Tenggara dapat memanfaatkan karet dengan baik di pergunakan sebagai tanaman perkebunan komersil untuk menyerap lapangan kerja dan menambah sumber pendapat negara.

Di Indonesia karet alam pertama kali di perkenalkan pada tahun 1864 di Kebun Raya Bogor pada masa penjajahan Belanda sebagai tanaman Koleksi. Selanjutnya karet alam di lakukan pengembangan ke beberapa daerah untuk menjadi tanaman Perkebunan komersil. ⁵ Jenis karet *Havea Brasiliensis* memulai pengembangan budidayanya di Sumatera pada tahun 1902 dan empat tahun selanjutnya pada 1906 pengembangan dilakukan di Pulau Jawa. Tercatat Indonesia ⁵ pada masa itu menjadi penghasil karet nomer satu di dunia sebelum terjadinya perang dunia kedua hingga tahun 1956. Namun di tahun selanjutnya pada 1957, posisi Indonesia sebagai produsen terbesar di geser oleh Malaysia.

Perkembangan luas area Perkebunan karet di Indonesia setiap tahunnya memiliki peningkatan di antaranya pada tahun 2012 sampai dengan 2022 demikian juga hasil produksi yang juga meningkat, kecuali di tiga tahun belakangan ini pada 2018 sampai 2020. Menurut kepemilikannya Perkebunan karet di Indonesia memiliki perbedaan kepemilikan di antaranya Perkebunan Besar (PB), ⁵ Perkebunan Rakyat (PR) dan Perkebunan Swasta (PS). ⁵ Sebagian besar lahan Perkebunan karet di kuasai oleh Perkebunan Rakyat sekitar 84,85%, sisanya di kuasai oleh Perkebunan negara 6,67% dan 8,84 % di kuasain Perkebunan swasta.

Pada data Ditjenbun tahun 2021 luas Perkebunan karet sekitar 3,78 juta hektar serta angka produksi karet pada tahun 2021 sekitar 3,12 juta ton (Dr. Anna A. Susanti & Rendy Kencana Putra 2022) .

Karet alam memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk bahan baku industri. Terlihat pada komoditas karet alam mempunyai 2 turunan hasil produksi primer antara lain getah karet dan biji karet. Pada produksi sekunder karet alam terbagi menjadi 3 yaitu latex untuk di jadikan alat Kesehatan, *crumb rubber* Sebagian besar produksinya di pakai untuk ban kendaraan serta komponen lainnya dan biji karet di jadikan minyak, tempurung dan bungkil. Adapun pohon industri karet alam di jadikan bahan baku lainnya bisa di lihat pada gambar di bawah ini.

Subsektor Perkebunan memiliki peran yang penting pada PDB Indonesia dan memiliki peluang untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mensejahterakan petani-kecil khususnya yang memiliki lahan perkebunan rakyat. ⁵ Karet merupakan Salah satu sub sektor Perkebunan yang memiliki potensi sangat besar pada produksinya. Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam dengan eksportir karet alam terbesar di dunia. Selain peluang ekspor pada karet begitu terbuka, pasar industri karet dalam negeri juga membuka peluang untuk berkontribusi dalam menyerap pemasaran karet alam.

4.6 Ekspor Karet Alam Indonesia

Industri karet merupakan salah satu komoditas utama Perkebunan Indonesia dalam menyumbangkan GDP Indonesia. ⁵ Salah satu komoditas utama pada sektor Perkebunan ialah karet alam. Karet alam Indonesia menjadi produk ekspor unggulan kedua setelah kelapa sawit dalam menyumbang devisa terbesar pada Indonesia di sektor Perkebunan. posisi Indonesia pada ekspor karet alam memiliki pengaruh di negara-negara dunia karena sangat ketergantungan pada karet alam Indonesia yang menjadi salah satu produk unggulan di

bidang karet alam. Indonesia merupakan negara penghasil karet alam atau produsen terbesar kedua setelah Thailand (Pradini 2015). Tercatat produksi karet Indonesia pada tahun 2019 menyumbang sekitar 3,30 Juta ton dan tiga provinsi penyumbang produksi karet alam terbesar secara nasional pada tahun 2020 ialah berada di provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Riau. Nilai karet alam di Tingkat produsen dalam wujud “lump” pada tahun 2021 tercatat sekitar Rp. 8.126, per kg yang menunjukkan kecenderungan naik. Hal tersebut juga berbarengan pada nilai karet alam pada pasar internasional, Dimana nilai karet alam tahun 2021 sekitar USD 1,67 per kg dalam wujud karet TSR20 dan wujud karet SFP/MYS sekitar USD 2,17 per kg.

Indonesia merupakan salah satu eksportir karet alam kedua di dunia, tentunya produksi karet alam di setiap tahunnya mengalami peningkatan, Guna memenuhi kebutuhan di suatu negara yang menggunakan bahan baku karet dalam produksi barang yang dihasilkannya. Karet alam di Indonesia sebagian besar di produksi oleh Perkebunan karet milik rakyat dengan catatan 85%, 7% Perkebunan negara besar dan 8% di miliki oleh perkebunan besar milik swasta. Tercatat di tahun 2005 produksi karet alam Indonesia mencapai 2.2 juta ton (Perindustrian 2006). Jumlah tersebut dapat terus meningkat dengan melakukan peremajaan Perkebunan karet serta melakukan pemberdayaan lahan-lahan yang kurang produktif untuk di tanami karet alam. Dalam mengantisipasi adanya penurunan ekspor karet alam, ITRC berupaya melakukan inovasi baru dengan melakukan hirilisasi hasil industri pohon karet agar dapat nilai tambah dari hasil karet tersebut. Potensi pohon karet memiliki banyak ragam produk yang di hasilkan dari karet, namun karet alam yang sudah tua belum dapat di manfaatkan secara optimal. Pemanfaatan dari hirilisasi karet alam memiliki dampak yang cukup baik bagi sumber devisa negara Indonesia.

Tiga negara dengan tujuan ekspor utama dari Indonesia pada tahun 2020 ialah Amerika Serikat, Cina dan Jepang. Di tahun tersebut kinerja perdagangan karet alam Indonesia mengalami surplus yang cukup baik. Tercatat ekspor karet alam Indonesia pada tahun 2020 adalah sekitar 2,46 juta ton setara kalua di hitung dengan USD 23,25 Milyar dan di tahun selanjutnya pada 2021 ekspor komoditas karet kembali naik pada periode Januari-Agustus 2021 dengan nilai perdagangan karet alam kurang lebih sebesar 37,57% menjadi USD, 277 Milyar. Dari sisi impor Indonesia hanya sedikit mengimpor komoditas karet dengan kode hs tertentu dari empat negara seperti Jepang, Thailand dan Vietnam dan Pantai Gading dengan impor sekitar USD 42,18 juta dari empat negara tersebut. (Dr. Anna Astrid S. and Sri Wahyuningsih 2021)

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Permintaan dan Konsumsi Karet Alam Global

Para ekonom memberi pandangan bahwa permintaan memiliki berbagai sudut pandang. Menurut Campbell, Stanley, Sukirno dan Sean permintaan di definisikan sebagai kuantitas suatu produk yang ingin di beli oleh konsumen melalui pasar dalam tingkatan harga dan waktu tertentu. Menurut hukum permintaan penurunan nilai suatu barang akan meningkatkan kuantitas produk yang di pinta, dan sebaliknya jika semakin tinggi nilai suatu barang maka semakin sedikit permintaan kuantitas barang tersebut. (Campbell, M, Stanley, B and Sean 2011)

Menurut Mankiw, ada banyak faktor yang mempengaruhi permintaan pada suatu barang di antaranya harga pada suatu barang, harga pada produsen lainnya, pendapatan pada konsumen, banyaknya konsumen dan prediksi barang di masa yang akan datang. Pada studi kasus karet alam menurut Riri Haeruni pada penelitiannya, dalam mempengaruhi permintaan karet alam global ada beberapa faktor di antaranya oleh nilai rill karet alam dalam negeri, nilai suatu barang yang di produksi pada konsumen karet alam Indonesia, produksi barang domestik dan permintaan karet alam oleh konsumen di tahun-tahun sebelumnya (Ekonomi et al. 2015). Sedangkan menurut Agrippina, Djaimi dan Yusri dalam penelitiannya mengatakan faktor permintaan karet alam internasional di tentukan dari nilai tukar Yuan terhadap US Dolar serta pendapatan perkapita dari negara Amerika Serikat dan Jepang dan faktor yang memiliki pengaruh lebih besar dari ³ penawaran dan permintaan karet alam Indonesia di pasar internasional adalah harga karet alam domestik dan internasional (Agrippina Sinclair, Djaimi Bakce 2017).

Karet alam memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia. Total luas perkebunan karet Indonesia pada 2021 kurang lebih 129,25 ribu hektar dan mampu mempekerjakan petani karet sekitar 2,3 juta kepala keluarga (Hadjar 2023). Pada saat ini 70% pangsa pasar karet alam di kuasai oleh tiga negara yang tergabung dalam *International Tripartite Rubber Council (ITRC)*. Negara yang notabenenya produsen karet alam umumnya juga menjadi negara pengekspor karet alam dunia di karenakan produsen pada karet alam merupakan negara berkembang yang pada kegiatan industrinya belum terlalu besar sehingga alokasi karet alam lebih banyak ekspor di banding penggunaan dalam negeri (Limited 2014).

Nilai karet alam pada saat ini 2018-2021 sangat berfuktuasi tergantung pada kondisi dari penawaran dan permintaan pada konsumen pasar intenasional. Sejak tahun 2012, nilai karet alam selalu turun dan belum menunjukkan nilai yang signifikan seperti pada kenaikan

di tahun 2012 silam. Hal tersebut di sebabkan akibat melemahnya konsumsi pada penggunaan bahan baku karet alam, faktor cuaca yang mempengaruhi kualitas karet, ketidakjelasan gambaran permintaan dan penawaran pada karet yang menyebabkan timbulnya kesan *oversupply* karet serta tidak adanya transparan mengenai harga di pasar global melalui *rubber trading* (Gapkindo 2018).

Menurut *Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)*, permintaan pada karet alam tahun 2021 naik sekitar 14.10ton atau bertumbuh 2% dari yang sebelumnya pada tahun 2020 13,860ton (Andrianto 2021). Adapun permintaan dari pasar internasional mengenai sumber yang melibatkan bahan baku karet alam untuk di gunakan sebagai bahan baku industri di antaranya:

1. Industri Otomotif

Pada industri otomotif, karet alam di jadikan sebagai bahan baku pembuatan ban, bushing suspense, bumper serta part-part yang lainnya yang di perlukan pada kendaraan. Industri otomotif sangat sekali ketergantungan pada karet alam karena banyak part yang di gunakan dari bahan baku karet alam karena elastisitas sifat dan fungsinya (Global 2021). Faktor permintaan karet alam dapat di di pengaruhi dari permintaan pada pasar industri otomotif secara menyeluruh

2. Industri Ban

Pada industri Ban, karet alam di gunakan pada komponen-komponen seperti sidewall dan tread pada ban kendaraan berat, sepeda motor dan mobil. Industri ban menyerap 76% dari produksi karet global dan menjadi konsumen terbesar dari karet alam. Pada saat ini belum ada yang dapat menggantikan karet alam sebagai bahan baku industri ban dalam penerapannya (Etrma n.d.).

3. Industri Barang Konsumen

Pada industri konsumen, karet alam di jadikan sebagai bahan baku barang pembuatan perkakas rumah tangga selang dan produk karet lainnya.

4. Industri Kontruksi

Pada industry kontruksi, karet alam di jadikan sebagai bahan baku barang pembuatan olahan seperti seal, bantalan jembatan (bridge bearing) dan batalan, sandaran kapal (dock fender) serta produk industry kontruksi lainnya.

5. Industri Kesehatan

Pada industri kesehatan, karet alam di jadikan sebagai bahan baku barang pembuatan peralatan perlindungan diri (APD), sarung tangan, masker dan barang lainya yang di gunakan pada industri Kesehatan. Pada pandemi Covid-19 hampir seluruh kegiatan industri bahan baku karet mengalami penurunan akibat kebijakan pemberlakuan *lockdown* yang berpotensi anjlok dari adanya kebijakan tersebut. Pemberlakuan *lockdown* menyebabkan kemampuan produksi menurun karena pengurangan karyawan akibat di berlakukannya WFH dan juga menyebabkan permintaan menurun pada seluruh industri karena daya beli konsumen menurun akibat pandemi Covid-19, tidak terkecuali pada industri kesehatan yang bertahan bahkan naik mencapai 15% menurut Mey dan Ridder dari *Board of innovation*. Industri kesehatan pada saat pandemi Covid memberi keuntungan yang besar akibat kekhawatiran masyarakat dari penularan virus Covid-19 yang begitu cepat (P. P. Karet 2020).

Sebelum adanya Covid-19 konsumsi karet dunia di setiap tahunnya selalu meningkat. Berdasarkan data dari IRSG konsumsi karet alam pada tahun 2017 naik menjadi 13,5juta ton dari yang sebelumnya hanya 12,6ton pada tahun 2016. Kenaikan konsumsi karet dunia di

sebabkan oleh permintaan yang besar dari industri otomotif khususnya ban di berbagai negara dengan produksi terbesar berada di Tiongkok. Untuk bersaing di pasar internasional, Indonesia perlu meningkatkan kualitas karet alam untuk menghindari penurunan impor karet alam Indonesia oleh negara lain.

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, total konsumsi karet alam mengalami kontraksi sekitar 6,2% dengan kontraksi lebih dalam pada sektor ban sekitar 7,3% di banding kontraksi non-ban yang hanya 4,2%. Pemulihan yang lebih cepat di China, membantu konsumsi karet alam mengimbangi penurunan yang terjadi di negara lain karena di dukung industri ban komersil. Pada 2021 konsumsi *natural rubber* (NR) global turun 7% dan *synthetic rubber* (SR) turun sekitar 6,7% (IRSG 2022). Pandemi Covid-19 telah menjadi ancaman bagi perekonomian dunia salah satunya pada sektor Perkebunan. Melihat ketidakstabilan karet alam akibat pandemi Covid-19, International Tripartite Rubber Council di harapkan mampu dalam upayanya menstabilkan sektor karet alam melalui penerapan mekanisme dalam mengatasi permasalahan yang ada pada sektor karet alam saat ini.

5.2 Penerapan Mekanisme ⁴ International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia

Dalam fokus penelitian yang mengkaji dampak kerjasama multilateral *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) dalam meningkatkan ekspor karet alam periode 2018-2021, terdapat tiga skema kebijakan dalam menstabilkan nilai karet alam di antaranya:

5.2.1 Supply Management Scheme (SMS)

Pada penerapan kebijakan *supply management Scheme* (SMS), tiga negara telah sepakat menggunakan skema ini untuk mengatur penanaman karet agar dapat terkontrol laju produksi pada karet alam selain itu juga di sebabkan oleh ² perubahan faktor internal di

Indonesia yang disimulasi, untuk nantinya dilakukan skenario penurunan produksi karet alam. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai karet alam di pusat berjangka yang nantinya akan di lakukan penerusan pada Tingkat produsen Indonesia melalui pengendalian jumlah penawaran karet di pasar global (Purwaningrat, Novianti, and Kristyantoadi 2020). Penerapan skema ini telah diatur oleh ITRC sejak tahun 2006 dan di monitor setiap tahunnya pada pertemuan melalui komite statistik.

Salah satu tugas dari komite statistik adalah menghitung batas penanaman dan penanaman kembali karet alam oleh negara anggota ITRC. Ketiga negara pada 2006 telah bersepakat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun, ketiga negara dalam 12 tahun hanya dapat melakukan penanaman dan penanaman kembali sebanyak 1,163 ton dan dalam pelaksanaanya dilakukan saat harga karet anjlok (Ulfatmi 2016). *Supply Management Scheme (SMS)* merupakan kebijakan dalam mengatur pengendalian produksi di tingkat hulu untuk program jangka panjang dengan kesepakatan di antaranya:

A. Peremajaan perkebunan karet

Tanaman karet memiliki masa produktif 25-30 tahun. Setelah lewat masa produktif kondisi pada karet seharusnya memerlukan reinvestasi, dimana salah satu kuncinya adalah peremajaan perkebunan. Peremajaan perkebunan karet merupakan solusi untuk meningkatkan produktifitas perkebunan karet. Bagi tanaman karet tolak ukur dalam menentukan profitabilitas dari Perusahaan ialah dari produktifitas pada tanaman karet itu sendiri. Peremejaan karet di definisikan mengganti tanaman yang masa produktifnya telah habis untuk di gantikan tanaman baru yang di harapkan mendapatkan kualitas karet yang tinggi dan secara nilai lebih menguntungkan. Ada dua jenis peremajaan karet menurut Rajino yaitu, *replanting* di lakukan penanaman

ulang di atas lahan tanaman lama dan *new replanting* dilakukan pada lahan baru (Titik WIDYASARI 2015).

Peremajaan karet merupakan salah satu program jangka Panjang dari strategi ITRC yang telah di sepakati ketiga negara Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM) untuk mengatur produksi yang bertujuan agar tercapainya keseimbangan pasokan karet alam serta menjaga produktivitas karet alam.

Di lain itu peremajaan perkebunan karet juga berguna dalam pengendalian penyakit gugur daun karet (GDK) yang di sebabkan oleh *Colletotrichum gloesporioidies*, *Pestalotiopsis* sp dan *Oidium heveae*. Gejala dari penyakit ini sangat beragam dan mempengaruhi produktifitas karet alam. Tanaman yang di serang oleh virus akan mengalami kerusakan pada daun. Jika tidak di tangani tanaman karet akan mengalami penurunan produktivitas getah sekitar 40%. Dalam melakukan pengendalian penyakit pada perkebunan karet. Pemerintah melakukan sanitasi kebun, pemupukan tanaman sesuai dosis anjuran secara teratur, peremajaan perkebuna karet jika terjadi serangan berat dan penyemprotan melalui zat kimia (Pertanian 2023).

Kegiatan replanting sudah di rencanakan oleh pemerintah sejak tahun 2017 dengan target 60% dari perkebunan karet rakyat atau sekitar 1.8juta ha dalam kurun waktu 30 tahun atau 60.000 ha/tahun (Perkebunan 2017). Namun realisasinya replanting baru dilakukan 6ribu ha pertahun dari total luas lahan 3,6juta ha. Hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan anggaran belanja negara (Primadhyta 2017). Karet alam Indonesia memiliki keunggulan tenis yang tidak dimiliki produsen karet negara lain yang di butuhkan pada industri ban, sehingga produktivitasnya perlu di jaga.

B. Diversifikasi tanaman perkebunan

Diversifikasi tanaman perkebunan dapat di definisikan sebagai upaya untuk memperluas atau menggantikan jenis tanaman dengan kegiatan ekonomi lainnya pada perkebunan. Tujuan adanya diversifikasi perkebunan ialah untuk mengurangi ketergantungan petani pada satu jenis komoditas atau sumber pendapatan tunggal agar petani memiliki opsi jika pasar mengalami fluktuasi sehingga diversifikasi perkebunan dapat menjadi solusi akibat perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu sehingga macam-macam kegiatan ekonomi dapat menyelamatkan pendapatan para petani.

Diversifikasi merupakan salah satu strategi dari pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan para petani. Hampir di seluruh daerah di Indonesia menggunakan program diserifikasi pertanian dalam meningkatkan pertanian (Pertanian 2017). Contoh dari diversifikasi pertanian karet diantaranya:

1.) Diversifikasi perkebunan dengan sistem tumpangsari karet

Pendapatan petani dari perkebunan karet belum optimal karena harga komoditi karet berfluktuatif cenderung menurun. Usaha *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* dalam mengatasi masalah tersebut dengan membentuk sub-skema diversifikasi perkebunan pada pengendalian produksi karet di hulu pada tingkat perkebunan atau *Supply Management Scheme (SMS)*.

Model diversifikasi perkebunan melalui skema sistem tumpangsari karet dengan tanaman ekonomis lainnya di harapkan mampu menjadi solusi para petani dalam menghapi situasi harga karet yang rendah pada saat ini (P. Karet 2021). Diversifikasi sistem tumpangsari di definisikan sistem penanaman campuran dalam lahan produktif. Tujuan utama sistem tumpangsari ialah membentuk frekuensi kunjungan petani

semakin meningkat, dengan banyaknya tanaman perkebunan di datangi maka akan semakin berhasil. Tujuan lainnya ialah menambah pendapatan dari satuan luas tanah, memberikan penghasilan sebelum tanaman karet menghasilkan panen dan memanfaatkan area di gawangan karet (A. Karet 2021).

Sistem tumpangsari optimalnya dilakukan pada peremajaan karet hanya 1-2 tahun dengan jarak tanam tunggal, di tahun ketiga tanaman karet sudah kurang optimal karena tajuk karet sudah tertutup sehingga hanya tanaman tertentu saja yang di implementasikan pada sistem tumpangsari. Pengelolaan tumpangsari tidak merusak tanaman atau tanah melainkan sistem ini membuat kandungan organik tanah tinggi karena ada pupuk organik sisa dari tanaman semusim (P. Karet 2021).

Puslitkaret sudah menerapkan program tumpangsari karet dengan beberapa jenis tanaman seperti, jagung manis, cabai rawit, kedelai, jagung sorgum, kacang tunggak, kacang tanah, pisang, jagung, dan padi gogo sedangkan pada tahun ketiga puslit karet menerapkannya menggunakan temulawak, kunyit, kapulaga dan porang. Jika ingin di lakukan permanen tanaman semusim, metode peremajaan yang di pilih menggunakan jarak tanaman ganda. Kendala teknis pada pengembangan program ini adalah para petani menjadi bergantung kepada pemerintah mengenai dana bantuan, lemahnya keterhubungan instansi pemerintah dan non-pemerintah serta terganggunya upaya mobilitas akibat tidak terjaminnya kontinuitas anggaran dalam menjalankan konsep yang komprehensif. Kebijakan pemerintah sangat di perlukan pada metode tumpangsari ini

untuk mensejahterakan petani dalam mengendalikan produksi karet alam (P. Karet 2021).

2.) Diversifikasi perkebunan dengan sistem integrasi karet-ternak

Integrasi tanaman dengan peternakan dapat meningkatkan per unit lahan secara berkelanjutan. Sudah sejak lama peternakan di kaitkan dengan pertanian. Berbagai hewan peternakan berkeliaran merupakan hal yang biasa di daerah tropis. Penggunaan hewan untuk mengendalikan gulma di perkebunan sudah dilakukan oleh setiap negara dunia (Sánchez n.d.). Gulma merupakan tanaman yang tumbuh di area perkebunan yang menjadi hama dan menyebabkan penurunan pada produktifitas hasil pertanian karena persaingan pada komoditas utama.

Gulma tumbuh akibat kacang penutup tanah tajuknya menutup pada areal gawangan perkebunan karet, hal tersebut menimbulkan spesies gulma menggantikan kacang penutup tanah. Untuk pengendalian gulma, dibutuhkan biaya besar dengan sistem blanket dan penggunaan herbisida. Sistem tersebut juga merugikan dari sisi lingkungan karena menimbulkan erosi dan mencemarkan lingkungan (Liu, H., Yang, X., Blagodatsky, S. and C., Liu, F., Xu, J., & Cadisch 2019). Untuk solusi para petani, gulma yang ada pada perkebunan karet dapat di jadikan pakan ternak (Dianita 2012). Hal tersebut perlunya integrasi antara perkebunan karet dan ternak untuk berkolaborasi mengatasi permasalahan ini.

Terdapat beberapa keuntungan simbiosis mutualisme antara integrasi karet dengan hewan ternak. Adapun keuntungan dari petani karet adalah pengendalian spesies gulma pada hewan ternak secara gratis sedangkan para pengembala hewan ternak khususnya sapi, domba dan

kambing mendapatkan keuntungan pakan gratis dari adanya gulma pada pohon karet.

Spesies yang dapat di manfaatkan untuk pakan ternak di antaranya, ² Axonopus compressus, Ottochloa nodosa, Ageratum conyzoides, Mimosa pudica, Mikania michrantha, dan Asystasia gigantea (Sari, H. F. M., & Rahayu 2013). Pada penelitian Hutapea dkk, memberikan hasil rumput yang dihasilkan dari perkebunan karet dapat memberikan pertambahan berat pada sapi sampai 0,36kg perhari dengan komposisi 10% rumput segar dan 1% konsentrat (Hutapea, Y., Suparwoto, S., Suryana and & Hutabarat 2019).

Petani dan peternak memiliki keterhubungan yang positif dalam mendapat keuntungan nilai tambah dari hasil kerjasama pada komoditas tersebut. Agar kegiatan kerjasama berjalan dengan baik perlunya integrasi antara petani dan peternak untuk mendapat keuntungan dan efisiensi ekonomi yang meningkat dengan melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai mekanisme pembagian hasil dari adanya kerjasama tersebut. (Junaidi 2020).

5.2.2 Demand Promotion Scheme (DPS)

Demand Promotion Scheme (DPS) merupakan skema dari *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* yang bertugas untuk mencari inovasi baru untuk meningkatkan permintaan pasar global pada karet alam serta meningkatkan konsumsi dalam negeri maupun

internasional pada masing-masing negara anggota Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM). Adapun implementasi dari skema *demand promotion Scheme* yang sudah di terapkan pada negara Indonesia di antaranya:

A. Meningkatkan produk inovatif karet alam Indonesia

Sejak tahun 2011 harga karet alam telah terjadi perubahan yang sangat signifikan, dimana harga karet alam berfluktuatif cenderung menurun. Penurunan harga karet menyebabkan penurunan kemampuan investasi dalam hal peremajaan karet dan menurunnya pendapatan petani yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial bagi para petani. Beberapa petani mengalih fungsikan lahan karet alam menjadi tanaman lain yang lebih prospektif akibat menurunnya harga karet alam (P. Karet 2021).

Dalam mengatasi karet alam yang rendah, *International Tripartite Rubber Council* melalui skema kebijakannya *Demand Promotion Scheme (DPS)* berupaya meningkatkan produk inovatif karet alam domestik Indonesia dengan melakukan hirilisasi untuk meningkatkan nilai jual yang lebih baik untuk produk karet alam. Pada tahun 2019, Indonesia hanya mampu mengkonsumsi 19% karet alam dari total produksi dalam negeri. Pemerintah Indonesia berencana akan mengambil peran untuk meningkatkan serapan karet alam dalam negeri dengan menggunakan karet sebagai bahan baku infrastruktur dalam negeri. Adapun produk inovatif dari bahan baku karet alam Indonesia di antaranya:

Tabel 5.4

Hirilisasi Produk Inovatif Indonesia

No	Jenis Produk	Ton/tahun
	INFRASTRUKTUR	

1	Aspal Karet	112,000
2	Dock fender	2,500
3	Pintu irigasi	1,000
4	Rubber DAM	200
5	Rail pad	350
6	Bantalan jembatan	500
	Jumlah	116,550
	NON INFRASTRUKTUR	
7	Rubber cowmat	5,000
8	Conveyor-Belt	5,000
9	Lateks impor untuk glove	20,000
10	Produk lainnya	3,450
	Jumlah	33,450
	TOTAL	150,000

Potensi pada hirilisasi karet alam Indonesia sangat lah tinggi. Dapat dilihat pada tabel 5.1 yang menampilkan potensi karet alam selain untuk bahan baku pada industri ban, peningkatan inovatif karet alam sebesar 150.000 ton (P. Karet 2021). tidak hanya itu BKSJI Kementerian Pertanian mengatakan pada 2021 “peningkatan hirilisasi terus di lakukan untuk peningkatan sektor industri pengolahan karet agar memiliki daya saing tinggi dengan di lakukan optimaslisasi pemanfaat teknologi industri pada program industri hilir di Indonesia (Fahmi 2021).

B. Meningkatkan penyerapan karet dalam negeri Indonesia

Tiga negara dari anggota *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* telah bersepakat dan menyetujui akan menyerap karet alam dalam negeri masing-masing. Kesepakatan ini terjadi agar nilai karet alam stabil ketika terjadi tekanan. Pada saat ini 2018-2021 karet alam sangat berfluktuasi bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun nilai karet alam belum stabil.

Berdasarkan teori ekonomi peningkatan permintaan akan meningkatkan nilai barang. Berdasarkan kesepakatan kebijakan *Demand Promotion Scheme (DPS)* ini dilakukan untuk meningkatkan permintaan, pemerintah Indonesia melakukan kerjasama antar kementerian untuk mendorong penyerapan nilai karet alam untuk menstabilkan produksi karet dalam negeri agar tidak terjadi *over supply*.

Pada tahun 2019 kementerian PUPR bekerja sama dengan kementerian pertanian untuk menggunakan karet alam sebagai bahan baku infrastruktur dalam menangani jalan nasional seluruh Indonesia. Sekitar 65,56 km aspal karet di implementasikan oleh Kementerian PUPR dengan asumsi penggunaan karet 7% sebanyak 2.542 ton aspal karet atau sekitar 177,95 ton karet alam yang terserap dari aspal (Gapkindo 2019).

Penggunaan karet alam pada aspal memiliki keunggulan yang signifikan di antaranya meningkatkan campuran aspal, ketahanan pada deformasi alur, ketahanan retak pada aspal, reduksi kebisingan, peningkatan daya tahan terhadap iklim yang ekstrim, peningkatan keberlanjutan dan kinerja yang lebih baik pada suhu rendah (PUPR 2019).

⁷ Adanya tambahan komponen karet alam pada aspal menjadikan kualitas aspal lebih unggul di banding aspal murni. Material karet pada aspal menyebabkan aspal menjadi elastis berdampak pada kekuatan aspal sehingga tidak mudah meleleh. Dari segi harga, aspal karet di jual lebih tinggi 20% namun keunggulan yang didapat umur

layanan sampai 2 kali lebih panjang dengan aspal murni, justru akan lebih menghemat biaya pengeluaran pemeliharaan pada aspal karet.

Pemanfaatan aspal karet sudah dilakukan di beberapa daerah Indonesia seperti jalan lintas Jawa Tengah arus Aji Barang-Banyumas-Klampok-Banjar Negara sepanjang 4,8 km tol di Jawa Tengah dari total penanganan sekitar 63,03 km. dalam upaya peningkatan kualitas pada tol Jawa Tengah yang meliputi pemeliharaan rutin jalan (20,64 km), rehabilitasi besar (10,87 km), pemeliharaan jembatan (597,7 km), pelaksanaan pekerjaan (10,87 km) dan rekonstruksi jalan (0,9 km). Di harapkan pada peningkatan kualitas jalan Jawa mampu menyerap karet alam domestik Indonesia (Gapkindo 2019).

Pada saat ini aspal karet yang siap untuk dikembangkan adalah aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi yang sudah di uji cobakan pada kawasan danau Lido Bogor. Lateks pravulkanisasi merupakan latek pekat yang di olah melalui bahan kimia sehingga lebih tahan panas dan oksidasi. Pada saat ini bahan baku dari lateks pravulkanisasi di pasok dari perkebunan besar negara dan swasta. Agar mendapat pasokan lateks pekat di perlukan energi tambahan untuk mengelola hasil panen kebun dari berbentuk karet gumpalan menjadi lateks kebun (Perkebunannews 2019).

Petani karet alam semestinya di beri pelatihan untuk meningkatkan mutu karet dalam memproduksi lateks pekat untuk meningkatkan pendapatan para petani secara menyeluruh. Seperti pada petani di Way Kanan Provinsi Lampung yang berhasil mengolah lateks pekat dengan berhasil menjual harga yang menggiurkan kisaran 14.000 – 16.000 rp/kg kering pada kadar yang sama. Jenis bahan lainnya dari aspal karet adalah Serbuk Karet Alam Teraktivasi (SKAT) yang merupakan campuran karet alam berjenis mutu brown crepe/RSS/SIR 20 dengan serbuk karet berasal dari bekas ban dan bahan kimia adiptif. Potensi pada karet alam banyak

sekali, perlunya pemerintah bekerja sama dengan para petani untuk mengembangkan teknologi untuk meningkatkan penyerapan karet alam dalam negeri (Perkebunannews 2019).

5.2.3 Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)

⁶ *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* merupakan kebijakan pengendalian atau pengurangan pasokan karet alam yang dilakukan oleh tiga negara dari anggota *International Tripartite Rubber Council*. Skema ini dilaksanakan karena pasar dunia terjadi kelebihan pasokan di banding permintaan karet alam dalam mengatasi permasalahan tersebut di lakukannya pengendalian ekspor. Kebijakan ini menggunakan skema jangka pendek sebagai *short-term therapy mechanism* untuk menghentikan penurunan harga karet dan dalam menyeimbangkan pasokan karet alam sementara agar petani karet dapat menikmati harga yang relatif naik dan menguntungkan. Skema ini tidak bisa di lakukan dalam jangka Panjang jika tidak di lengkapi dengan pelaksanaan skema *supply management scheme (SMS)* secara efektif.

Skema ini pada awalnya berlaku pada 1 Januari tahun 2002 dengan pengurangan sebesar 10% melalui mekanisme AETS. Program AETS ini sudah di lakukan sebanyak enam kali sepanjang tahun 2002-2019 dan hasilnya cukup efektif. Dalam pengimplementasiannya berikut tabel pelaksanaan skema AETS yang di lakukan oleh tiga negara Thailand, Indonesia dan Malaysia.

Tabel 5.2 Implementasi Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)

Implementasi	AETS KE-1	AETS KE-2	AETS KE-3

Tanggal/Bulan/Tahun		2002	2009	Oktober 2012 - Maret 2013
Periode		12 bulan	12 bulan	6 bulan
Alokasi AETS (Ton)		380.253 ton	700.000 ton	300.000
Alokasi Pengurangan Ekspor bagi tiap Negara (Ton)	Thailand	193.200	342.743	142.772
	Indonesia	136.778	304.917	117.306
	Malaysia	50.275	52.341	39.922

Implementasi		AETS KE-4	AETS KE-5	AETS KE-6
Tanggal/Bulan/Tahun		Maret-Desember 2016	Januari-Maret 2018	1 April-31 Juli (Indonesia dan Malaysia) 20 May-19 September (Thailand
Periode		10 bulan	3 bulan	6 bulan
Alokasi AETS (Ton)		700.000 ton	350.000 ton	240.000
Alokasi Pengurangan Ekspor bagi tiap Negara (Ton)	Thailand	324.005	234.810	126.240
	Indonesia	238.736	95.190	98.160
	Malaysia	52.259	20.000	15.600

Sumber: Kementerian Perdagangan

Dapat dilihat pada table 5.2 sepanjang tahun 2018-2021 ITRC sudah menerapkan kebijakan AETS sebanyak dua kali di tahun 2018 dan 2019 dengan membatasi *supply* karet alam. Di tahun 2018 sejak Januari sampai maret, tiga negara menerapkan kebijakan AETS dalam memberlakukan pembatasan ekspor dengan total 350.000ton. Selanjutnya pada tahun 2019, penerapan kebijakan AETS kembali terjadi dengan kurun waktu 6 bulan dengan total pembatasan ekspor 240.000ton pada 1 April sampai 31 Juli yang di lakukan oleh Indonesia dan Malaysia, lalu di lanjutkann oleh Thailand pada 20 Mei sampai 19 September 2019 Jumlah pembatasan ekspor ketiga negara di bagi ⁶ secara proporsional sesuai dengan produksi dan kontribusi masing-masing ekspor ketiga negara.

Dalam program pelaksanaan skema kebijakan AETS, telah di atur alokasi karet alam melalui Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada Nomor 779 tahun 2019 yang mengatur jenis-jenis karet dalam pengurangan ekspor bagi tiap negaranya di antaranya:

- a) Karet alam berjenis ⁶ Concentrated latex / Centrifuged latex (Kode HS 400110)
- b) Karet alam berjenis Ribbed Smoked Sheet Rubber ⁶ (Kode HS 400121)
- c) Karet alam berjenis Technically Specified Rubber (Kode HS 400122)
- d) Karet ala Berjenis Mixture Rubber (Kode HS 400280)
- e) Karet alam berjenis Compounded Rubber (Kode HS 400510,400520,400591, dan 400599)

Dalam pelaksanaan kebijakan AETS setiap negara di monitor kegiatan ekspornya melalui *National Tripartite Rubber Corporation (NTRC)* dalam pengimplementasian pembatasan ekspor karet alam yang telah di sepakati tiga negara Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM) (Perdagangan 2019).

Penerapan kebijakan AETS dapat meningkatkan harga ekspor karet alam global yang berdampak pada kesejahteraan petani namun untuk para pelaku usaha skema ini dapat

berdampak buruk akibat kurangnya profit karena terjadi pengurangan jumlah penjualan ekspor karet alam sehingga barang tidak didistribusi secara optimal karena pembatasan ekspor karet alam. Tiga negara anggota ITRC Thailand, Indonesia dan Malaysia (TIM) dalam penerapan skema ini perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien agar penurunan jumlah ekspor akibat pembatasan karet alam sebanding dengan kenaikan nilai karet alam yang diproduksi internasional. Sehingga penerapan kebijakan AETS tidak mengganggu kinerja ekspor karet alam ke negara eksportir (Suprehatin & 2022).

Skema kebijakan AETS merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan nilai karet alam sehingga menguntungkan petani karet dalam jangka pendek dengan kenaikan nilai jual karet alam. Thailand, Indonesia dan Malaysia berkomitmen dalam menjalankan skema AETS sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjalankan regulasi di setiap negara melalui *National Tripartite Rubber Corporation* (Perdagangan 2019).

5.3 Akuntabilitas International Tripartite Rubber Council

Dalam menjalankan prosedur skema kebijakannya, *International Tripartite Rubber Council* memiliki akuntabilitas terhadap tiga negara anggotanya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan prosedur pekerjaan yang telah disepakati oleh setiap anggotanya. Dalam menjalankan kebijakannya, ITRC dibantu oleh *National Tripartite Rubber Corporation* sebagai **focal point** di masing-masing **negara** anggota untuk memonitor pengimplementasian skema prosedur SMS dan AETS. Kebijakan yang telah dijalankan ITRC memiliki akuntabilitas atau pertanggungjawaban agar tercapainya kerjasama multilateral yang memiliki kredibilitas serta memiliki manfaat secara maksimal dalam menstabilkan nilai karet alam. ITRC dibantu oleh NTRC serta beberapa komite dalam memberikan pertanggungjawaban kepada negara anggota agar tercapainya transparansi sehingga memiliki kredibilitas pada kerjasama yang telah di

jalankan ITRC. Adapun struktur kerjasama ITRC dalam mempertanggung jawabkan dalam melaksanakan tiga skema kebijakannya di antaranya:

Dalam mewujudkan stabilisasi nilai karet alam, Indonesia menjadikan Kementerian Perdagangan sebagai focal point, Kementerian Pertanian sebagai pelaksanaan kebijakan *Supply Management Scheme (SMS)* dan Gapkindo sebagai pelaksanaan program *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* dalam mengatur pasukan supply jangka pendek.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan kemajuan sektor karet alam, ITRC membentuk beberapa *Committees/Expert Group/Working Group*, sebagai pertanggung jawaban ITRC pada negara anggotanya antara lain:

- i. Komite Statistik (*Statistical Committee*)
 - Bertujuan untuk merumuskan mekanisme *Supply Management Scheme (SMS)* dan *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*.
 - Beranggotakan minimal 3 (tiga) perwakilan dari TIM.
- ii. Komite Pemantauan dan Pengawasan AETS (*AETS Monitoring and Surveillance Committee*) – akan dibentuk saat AETS akan dilaksanakan
 - Bertujuan untuk memastikan kepatuhan negara anggota dalam pelaksanaan AETS. Hasil evaluasi pelaksanaan akan dilaporkan kembali ke ITRC.
 - Beranggotakan 2 (dua) perwakilan dari masing-masing negara anggota (TIM).
 - *Chairman*: CEO of IRCo.
- iii. Komite Skema Promosi Permintaan (*Demand Promotion Scheme Committee/DPSC*) – aktif
 - DPSC berfungsi untuk merekomendasikan langkah-langkah kepada negara anggota untuk meningkatkan konsumsi karet alam baik dalam lingkup domestik maupun internasional.

- Beranggotakan minimal 1 (satu) ahli teknologi dan 1 (satu) ahli ekonomi/pemasaran dari TIM.
 - *Chairman*: Negara tuan rumah dari masing-masing pertemuan DPSC.
- iv. Komite Biaya Produksi (*Cost of Production/CoP Committee*) – tidak aktif
- Bertujuan untuk menganalisis biaya produksi karet alam di negara anggota untuk mendapatkan CoP rata-rata untuk ITRC.
 - Beranggotakan masing-masing 3 (tiga) perwakilan dari TIM.
- v. Kelompok Pakar Pembentukan Pasar Karet Regional (*Expert Group on Establishment of a Regional Rubber Market/EGERRM*) – tidak aktif
- EGERRM mengkoordinasikan upaya pembentukan Pasar Karet Regional yang meliputi studi kelayakan, harmonisasi *bye-law*, arbitrase, aturan dan regulasi perdagangan, dll.
 - Beranggotakan minimal masing-masing 3 (tiga) perwakilan dari TIM.
 - *Chairman*: ditunjuk berdasarkan keahlian.
 - Terdapat 2 Kelompok Kerja yang dibentuk di bawah EGERRM, yaitu: a) *Technical Working Group on Bye-Laws* (TWG-BL), dan b) *Technical Working Group on Exchange Rules and Regulations* (TWG-ER).

Dalam menjalankan kebijakannya, *International Tripartite Rubber Council* memiliki pertanggungjawaban dalam memastikan komitmen setiap anggota dalam menjalankan program di setiap kebijakannya melalui NTRC. Setiap anggota wajib melaporkan produksinya serta hasil ekspor karet alam di setiap pertemuan tahunannya dan akan di periksa melalui komite pemantauan AETS saat di jalankan program tersebut untuk melihat komitmen atau integritas setiap anggota dalam menjalankan kesepakatan dan regulasi masing-masing negara anggota. Saat implementasi skema AETS dijalankan, skema tersebut

akan terus di monitor dan di evaluasi melalui komite yang ada di ITRC (Perdagangan 2019). Jika ada suatu negara yang melanggar pada kebijakan pemberlakuan AETS, maka negara tersebut akan di berikan sanksi berupa perpanjangan pembatasan ekspor karet alam.

5.4 Dampak Kerjasama Multilateral Internasional Tripartite Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia Periode 2018-2021

Melihat hasil dampak dari kerjasama multilateral ⁴ *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) terhadap ekspor karet alam Indonesia Periode 2018-2021 melalui prosedur dan akuntabilitas yang sudah di sepakati, maka penelitian ini akan menampilkan data secara keseluruhan mengenai nilai ekspor karet alam serta bentuk pertanggungjawaban ITRC dalam menjalankan tiga skema kebijakannya pada periode 2018-2021.

⁶ Para petani karet tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga karet alam dunia sehingga kerjasama multilateral ini terbentuk untuk menstabilkan nilai karet alam. Petani merupakan *price taker* dan harga karet alam terbentuk karena pasar. Dari hasil penelitian Amalia, Nurmalina dn Rifin (2013) mengenai analisis integrasi pasar vertical menyatakan bahwa petani karet cenderung sebagai penerima harga dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh sebab itu kerjasama multilateral tiga negara produsen terbesar karet alam di dunia di lakukan dengan membentuk *International Tripartite Rubber Council* dalam berupaya menstabilkan nilai karet alam agar dapat melindungi kesejahteraan petani karet.

Tiga skema kebijakan yang telah di buat ITRC di harapkan mampu serta efektif dalam menstabilkan nilai karet alam global. Berdasarkan data IRSG pada tahun 2017, negara anggota ITRC menjadi penyumbang pasokan karet alam dunia sebesar 67,5 persen dari total

produksi dunia Dalam upayanya menstabilkan nilai karet alam (Purwaningrat, Novianti, and Kristyantoadi 2020). *International Tripartite Rubber Council* telah melaksanakan tiga skema kebijakannya ² *Supply Management Scheme (SMS)* Mengatur produksi dengan tujuan agar tercapai keseimbangan pasokan karet alam. ³ *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* Mengatur pasokan *supply* dalam jangka pendek dengan cara membatasi ekspor karet alam. *Demand Promotion Scheme (DPS)* Meningkatkan konsumsi karet alam baik domestik maupun global.

Tiga skema tersebut juga di realisasikan serta di teruskan oleh pemerintah Indonesia sebagai kebijakan dalam negeri. Pemerintah ikut andil mengambil peran dalam membantu mensejahterakan petani karet dengan melaksanakan kebijakan *Supply Management Scheme (SMS)* dan *demand promotion Scheme (DPS)*. Pemerintah menganggap pasar tidak mampu dalam mencapai kesejahteraan petani secara luas. Tetapi tujuan tercapainya kebijakan, umumnya di sertai dengan adanya pihak yang di korbakan. Oleh karena itu kebijakan pemerintah Indonesia yang berdasarkan kesepakatan *International Tripartite Rubber Council* akan memberikan dampak bagi Indonesia selaku pelaksana skema kebijakan, terutama kepada petani karet selaku penggerak tulang punggung perkaretan nasional. Untuk melihat dampak dari skema kebijakan *International Tripartite Rubber Council*, penulis akan menampilkan data produksi, konsumsi serta nilai ekspor dan total ekspor karet alam Indonesia 2018-2021.

Melihat dari gambar 5 mengenai outlook komoditas karet alam pada produksi dan konsumsi, terlihat selama kurun waktu 2017-2021 produksi karet alam Indonesia di tujukan untuk ekspor dan kurangnya penyerapan karet domestik dengan rata-rata konsumsi sekitar 19% dari hasil produksi nasional. Padahal kebijakan *demand promotion Scheme* sudah di lakukan dengan melakukan penyerapan karet alam sebagai bahan baku aspal dalam

penanganan jalan nasional seluruh Indonesia. Pada tahun 2017-2021 Produksi dan konsumsi karet alam terlihat berfluktuasi dan cenderung menurun pada 2020 akibat adanya gangguan Covid-19 pada tahun 2019 di puncak tahun 2020 yang membuat industri hilir dalam negeri terganggu sehingga pengoprasionalnya terhenti (Syarifa et al. 2023) .

Dapat di lihat pada gambar 6 realisasi ekspor karet alam sepanjang tahun 2018-2021 ekspor karet alam di Indonesia pada empat tahun terakhir mengalami kecenderungan berfluktuasi. Yang dimana pada kegiatan ekspor pada komoditas karet alam mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan. Tercatat dari data BPS tahun 2018 merupakan perolehan ekspor tertinggi dalam empat tahun terakhir pada komoditas karet alam di Indonesia yang berhasil mengekspor 2.954,37 ton dengan nilai U\$ 4.166,90 Juta USD, di tahun selanjutnya pada 2019 ekspor karet alam mengalami penurunan sekitar 2,582,59 Ton dengan nilai US\$3.654,93 Juta USD, dan 2020 kembali mengalami penurunan total ekspor 2.455,24 Ton dengan nilai US\$43.246.11 Juta USD, dan di tahun 2021 komoditas karet alam berhasil mengalami surplus peningkatan yang cukup signifikan dengan total ekspor 2.385,18 Ton dengan nilai US\$4.015,67 Juta USD (DitjenPPI 2023).

Perolehan kuota ekspor karet alam Indonesia sepanjang tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi cenderung menurun di akibatkan beberapa faktor. Di tahun 2018 perolehan tertinggi pada empat tahun terakhir menurun di banding tahun sebelumnya 2017 dengan berhasil mengekspor 3,276,958ton dengan nilai \$5,589,884 juta USD. Tingginya total ekspor karet alam pada 2017 di akibatkan naiknya harga karet alam setelah terlaksananya skema kebijakan AETS pada 2016 sehingga eksportir mulai mengekspor besar-besaran yang berdampak pada *oversupply* sehingga terjadi penurunan harga pada karet alam. Setelah adanya penurunan nilai karet alam, skema kebijakan AETS kembali di laksanakan pada tahun 2018 dan 2019 untuk menaikkan harga karet alam dengan membatasi kuota ekspor sehingga saat pemberlakuan kebijakan AETS total kuota ekspor karet alam Thailand,

Indonesia dan Malaysia mengalami penurunan. Faktor lain penurunan ekspor karet alam Indonesia pada 2018 di akibatkan penurunan produksi akibat rendahnya harga dan perkebunan karet terdampak penyakit gugur daun karet (GDK).

Dalam pengendalian penyakit gugur daun karet (GDK), ITRC menerapkan skema kebijakan *Supply Management Scheme (SMS)* dengan melakukan peremajaan perkebunan karet (*replanting*) dalam mengatasi permasalahan pada hama yang hingga di perkebunan karet. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai karet alam di pusat berjangka yang nantinya akan di lakukan penerusan pada Tingkat produsen Indonesia melalui pengendalian jumlah penawaran karet di pasar global.

Di tahun selanjutnya, penurunan kembali terjadi pada tahun 2020 di karenakan kebijakan *lockdown* akibat pandemi Covid-19 sehingga perdagangan internasional terhenti dan konsumen utama komoditas karet mengurangi permintaan akibat penurunan jumlah konsumsi industri bahkan sampai menghentikan kegiatan produksinya. Pandemi juga menyebabkan pengiriman tertunda bahkan pembatalan kontrak dari negara konsumen karet alam sehingga tahun tersebut terjadi *excess supply* tertinggi dalam empat tahun terakhir 2018-2021 yang mencapai angka 0,39 juta ton atau 3% terhadap konsumsi global (Syarifa et al. 2023). Di tahun 2021 kebijakan *lockdown* mulai renggang sehingga ekspor karet alam meningkat serta nilai pada karet alam juga meningkat. Dapat di lihat perolehan nilai karet alam global melalui diagram gambar di bawah ini:

Di lihat gambar 7 mengenai nilai karet alam dalam wujud TSR dan RSS mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2018-2021. Perolehan naiknya nilai karet alam jenis TSR dan RSS3 pada tahun 2020 dan 2021 di picu oleh skema pengendalian kebijakan AETS yang di berlakukan pada tahun 2018 dan 2019. Prediksi akan naiknya harga karet alam setelah di berlakukan kebijakan AETS nampaknya tidak mendapat angin segar, karena pada tahun 2020 ada penghambat akibat munculnya gelombang Covid-19 yang berdampak pada

turunnya permintaan karet alam dunia (Iif Rahmat FAUZI , Lina Fatayati SYARIFA , Rahmanta GINTING 2021). Sehingga pengendalian ekspor dari skema kebijakan AETS tidak langsung berdampak setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, melainkan dampak dari kebijakan tersebut terlihat setelah di buka kebijakan *lockdown* Covid-19. Harga pada karet alam mengalami penurunan sejak maret 2020, tetapi nilai karet alam jenis TSR kembali meningkat pada Juni 2020 sekitar US Cent 176,4 per-kg pada. Perolehan nilai karet alam tersebut bertahan sampai 2021 dengan harga rata-rata sekitar 1,68 (TSR) dan US\$ 2,08 (RSS3). Sedangkan dalam wujud lump dapat di lihat gambar di bawah ini:

Pada gambar 8 harga karet alam dalam wujud lump juga berfluktuasi dan terjadi penurunan terendah pada April 2020 hingga Rp.5.152 per kg dan harga tertinggi pada bulan April 2021 sekitar Rp.8.558 per kg. pencapaian harga karet alam pasca pandemi ini cukup tinggi di banding tiga tahun sebelumnya yang lebih rendah dalam kurun waktu 2018-2021.

Dalam menstabilkan nilai ekspor karet alam, *International Tripartite Rubber Council* memainkan peran penting dalam meningkatkan harga karet alam dalam jangka pendek dengan memberlakukan skema kebijakan AETS. Penurunan jumlah ekspor karet alam sekitar 3% akibat kebijakan AETS akan berdampak pada 2 variabel di antaranya nilai ekspor dan total ekspor. Dengan adanya penurunan penawaran pada ekspor karet alam Indonesia akan menyebabkan peningkatan nilai ekspor sekitar 5,21% tetapi pembatasan ekspor menyebabkan penurunan penawaran pada *supply* pasar global sehingga meningkatkan nilai pada karet alam di bursa berjangka sekitar 4,12% (Purwaningrat, Novianti, and Kristyantoadi 2020).

Dari hasil penelitian Linda Dkk, yang mengatakan bahwa pembatasan ekspor ketiga negara menyebabkan penurunan *supply* di pasar global yang berdampak pada total penawaran ekspor karet alam dunia sehingga pasar global terjadi ketidakseimbangan. Untuk mencapai keseimbangan pada pasar global, harga karet alam akan meningkat sekitar 4,32%.

Kenaikan harga karet alam global di bursa berjangka akan di respon oleh pasar fisik negara eksportir seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia (Purwaningrat, Novianti, and Kristyantoadi 2020). Hasil penelitian dari Linda Dkk selaras dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Nurhidayati yang mengatakan pangsa produsen karet alam di pegang oleh negara anggota ITRC sekitar 66,86 dari total produksi dunia pada 2014. Sehingga ITRC memiliki kemampuan dalam mempengaruhi harga pasar global. Dengan adanya penerapan kebijakan AETS menyebabkan terjadinya psikologis pada speculator dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan karet alam global (Nurhidayati 2015).

Namun perolehan dari pelaksanaan skema kebijakan AETS dalam menaikkan harga karet alam sering kali di langgar dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dari itu pentingnya kepatuhan dan ketegasan pada ITRC mengatasi permasalahan tersebut pada setiap anggota yang melanggar agar kebijakan AETS dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya kecurangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan penulis mengenai “Dampak Kerjasama Multilateral ⁴International Tripartite Rubber Council Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia Periode 2018-2021” maka dapat di simpulkan bahwa *International Tripartite Rubber Council (ITRC)* telah berhasil menaikkan nilai karet alam dengan menjalankan tiga

skema kebijakannya melalui ⁴ *Supply Management Scheme (SMS)* dalam mengatur produksi agar tercapai keseimbangan pasokan karet alam dengan melakukan peremajaan perkebunan dan diversifikasi perkebunan, ⁹ *Demand Promotion Scheme (DPS)* meningkatkan konsumsi dalam negeri melalui hirilisasi dan meningkatkan penyerapan karet alam dalam negeri dan ³ *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)* mengatur pasokan *supply* karet alam dalam jangka pendek. Tiga skema kebijakan yang telah di buat ITRC memiliki integrasi antara satu dengan lainnya sehingga negara anggota ITRC mampu dalam upaya menstabilkan nilai karet alam. di lihat pada hasil pembahasan penelitian mengenai output perolehan nilai karet alam pasca pemberlakuan kebijakan AETS yang naik dalam waktu jangka pendek sehingga berdampak pada kesejahteraan para petani karet alam Indonesia. Namun akuntabilitas dalam menjalankan skema kebijakan AETS tidak memiliki ketegasan sehingga negara anggota ITRC dapat melanggar tanpa adanya sanksi yang berat. Ketidapatuhan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan ketidakefektifan dalam berjalannya skema kebijakan tersebut dan negara yang menjalankan dengan integritas yang tinggi mengalami kerugian akibat adanya kecurangan tersebut. Hasil indikator input dan output pada penelitian kerjasama multilateral ITRC pada 2018-2021 menyatakan keberhasilan ITRC dalam mempengaruhi nilai karet alam global meskipun harga dan total ekspor karet alam masih berfluktuasi akibat faktor fundamental yang tidak dapat di prediksi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis paparkan di atas maka penelitian ini akan menyampaikan suatu saran untuk turut membantu menyampaikan aspirasi akademisi terhadap skema kebijakan pada *International Tripartite Rubber Council (ITRC)*. Pada skema kebijakan *Agreed Export Tonnage Scheme (AETS)*, skema ini telah memberikan kontribusi dalam memberikan efek pada kenaikan nilai karet alam dunia. Namun dalam pelaksanaanya

belum maximal, karena negara anggota ITRC masih ada yang melanggar dalam pelaksanaan kebijakan AETS karena tidak adanya perjanjian sanksi yang tegas jika suatu negara melanggar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu di rekomendasikan, pentingnya penguatan upaya diplomasi komoditas karet alam dengan membuat perjanjian sanksi yang tegas jika ada negara yang melanggar dalam pelaksanaan kebijakan AETS. Sehingga skema kebijakan AETS mampu secara maximal untuk meningkatkan nilai karet alam global. Saran selanjutnya ialah, perlunya penguatan kerjasama multilateral pada komoditas karet dengan melakukan penambahan negara anggota, seperti Vietnam yang merupakan salah satu produsen terbesar karet alam sehingga pengendalian nilai karet alam lebih maximal dalam upaya menstabilkan nilai karet alam.

Dampak Kerjasama Multilateral International Tripartite Rubber Council (ITRC) Terhadap Ekspor Karet Alam Indonesia Periode 2018-2021

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ms.wikipedia.org Internet Source	2%
2	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.kemendag.go.id Internet Source	1%
7	perkebunannews.com Internet Source	1%
8	www.puslitkaret.co.id Internet Source	1%

ditjenppi.kemendag.go.id

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arya Chandra Aljabaru
Nim : 07041182025105
Prodi : Hubungan Internasional

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/~~Tesis/Disertasi/Lap-
Penelitian~~ yang berjudul DAMPAK KERJASAMA MULTILATERAL INTERATIONAL
TRIPARTITE RUBBER COUNCIL (ITRC) TERHADAP EKSPOR KARET ALAM
INDONESIA PERIODE 2018-2021

Dicek oleh operator *:

1. Dosen Pembimbing

2. UPT Perpustakaan Unsri

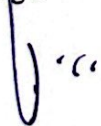
Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya
pertanggung jawabkan.

Indralaya,
Yang menyatakan,



Arya Chandra Aljabaru
NIM. 07041182025105

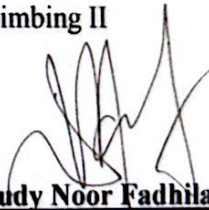
Menyetujui,
Pembimbing I



Dr. Ir. H. Abdul Najib, MM.

NIP. 196002091986031004

Pembimbing II



Maudy Noor Fadhila, S.H.INT,M.A.

NIP. 199408152023212040